

BAB II
GAMBARAN UMUM ACEH PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN
INDONESIA (1945 – 1949)

II. 1. Proklamasi dan Reaksi Rakyat Aceh

Setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya bangsa Indonesia pun segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.²⁴ Akan tetapi, secara resmi berita proklamasi tersebut baru sampai ke Aceh pada 24 Agustus 1945.²⁵ Hal tersebut dikarenakan Jepang melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi tersebar luasnya berita kemerdekaan Indonesia tersebut. Tindakan-tindakan tersebut antara lain adalah melarang masuk kerja bagi orang Indonesia yang bekerja di Kantor berita Jepang (*Domei*), menyita radio-radio penduduk, menyeleksi berita-berita yang dikeluarkan oleh surat kabar *Atjeh Sinbun*.²⁶

Walaupun berita kemerdekaan Indonesia berusaha ditutup-tutupi oleh Jepang, namun tetap saja sampai ke telinga rakyat Aceh. Berita mengenai kemerdekaan Indonesia tersebut diperoleh dari orang yang bekerja di bagian jaringan radio dan telegraf yang pada saat itu dikuasai oleh Jepang dengan cara “menangkap” saluran

²⁴ Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan ini didasarkan pada cerita K. Yamada sehari setelahnya mengenai perintah *Tjokan* agar *Atjeh Sinbun* jangan diterbitkan lagi dikarenakan Jepang telah kalah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991, hlm. 209.

²⁵ Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektip Sejarah*, *op. cit.*, hlm. 67.

²⁶ *Ibid.*, lihat juga TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 127.

yang memberitakan tentang kemerdekaan Indonesia saat orang Jepang lengah.²⁷ Akhirnya berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Aceh, rakyat Aceh pun menyambutnya dengan rasa gembira. Sejak saat itu, para pemuda Aceh meningkatkan kegiatan mereka dalam menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh daerah Aceh. Tidak jauh berbeda dengan para pemuda, seorang tokoh Aceh, Teuku Nyak Arief, pun merayakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Dia memasang bendera Merah Putih dengan ukuran besar di depan kendaraannya kemudian dia berkeliling kota Kutaraja sambil menyerukan kepada penduduk agar memasang bendera yang sama di halaman mereka masing-masing sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka.²⁸

Pada 26 Agustus 1945, sebuah pesawat terbang Belanda dengan rendah dan menjatuhkan selebaran-selebaran kertas di atas kota Kutaraja (sekarang kota ini bernama Banda Aceh).²⁹ Penduduk Kutaraja pun mengambil dan membaca selebaran tersebut yang berjudul: “Kepada Penduduk Indonesia” dan berisikan bahwa perang telah selesai karena Jepang sudah mengaku kalah kepada sekutu. Pada penutup selebaran itu tertulis pernyataan “Hiduplah Seri Ratu!!, Hiduplah Indonesia!!”.³⁰

²⁷ Ada beberapa versi mengenai orang yang mengaku menerima berita kemerdekaan Indonesia yaitu Gazali Yunus, orang Indonesia yang bekerja di kantor berita Jepang (*domei*) dan Pak Ahmad Pos, seorang kepala kantor pos. Untuk lebih jelasnya lihat Ismuha, *op. cit.*, hlm. 68 dan TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 127.

²⁸ Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1976, hlm. 18.

²⁹ Ismuha, *op. cit.*, hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*

Yang dimaksud dengan Seri Ratu disini tidak lain adalah Ratu dari negeri Belanda dan pernyataan ini dapat diartikan bahwa Belanda ingin menduduki Aceh.

Dengan adanya peristiwa penyebaran selebaran tersebut, rakyat Aceh merasa cemas karena mereka bersama Ulama turut berperan dalam melawan Belanda pada saat Jepang akan datang ke Aceh tahun 1942. Ironisnya, ada juga kelompok di Aceh yang justru senang akan kembalinya Belanda dikarenakan mereka merasa mendapat keuntungan dari Belanda. Hal itu terlihat dari pernyataan T.M.A. Panglima Polem berikut ini:

Pada tanggal 24 Agustus 1945, kami dipanggil Tyokan diantaranya saja, T. Njak Arif, Tgk. Moh. Daud Beureu-eh & jang lain-lain. Tyokan menerangkan bahwa Djepang sudah berdamai dengan sekutu, lantaran didjatuhkan boom atoom. Achirnja kami mengetahui mereka sudah menjerah kalah. Setelah tersebar luas tentang kekalahan Djepang, maka keadaan mendjadi panas dingin. Kalau selama ini kami sudah panik, maka sekarang lebih panik lagi, terutama oknum-oknum jang sudah turut memberontak melawan Belanda, apalagi pemimpin-pemimpinnya, diantaranya [*sic!*] saja dan T. Njak Arif. Betapa tidak djika kami hendak gerilja, maka kami tidak mempunjai sendjata lagi. Disamping itu ada pula jang mendjadi senang mengharap kembali induk semangnja.³¹

Mereka yang dimaksud dengan mengharap kembali induk semangnya itu tidak lain adalah golongan Uleebalang. Hal ini disebabkan pada 1903 saat Belanda berhasil meruntuhkan kesultanan Aceh, Uleebalang mendapat kekuasaan besar atas daerah mereka masing-masing. Daerah mereka merupakan daerah *zelfbestuurgedied* (daerah pemerintahan sendiri) dengan Uleebalang sebagai *zelfbestuur*-nya, hal ini memungkinkan mereka bertindak sesuka hati mereka di daerah tersebut.

Reaksi keras untuk menentang kedatangan Belanda datang dari kalangan Ulama. Mereka mengadakan rapat pada 15 Oktober 1945 yang menghasilkan suatu

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

maklumat bersama yang berisikan bahwa perjuangan melawan penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia adalah Perang Sabil dan orang yang tewas dalam perang itu ganjarannya adalah mati syahid.³² Masyarakat Aceh sangat bersemangat apabila peperangan yang mereka lakukan merupakan suatu Perang Sabil dikarenakan ajaran Ulama yang menyebutkan mengenai keistimewaan seseorang yang melakukan perang di jalan Allah. Hal ini dapat dilihat dari puisi gubahan Keucik Yusuf dari Aceh Besar berikut ini:³³

*Allah hai prang, prang sabilillah
Mujahidin prang, prang sabilillah
Menyo matei syahid dalam prang sabil
Dudo Tuhan brie ainul mardiah*

Artinya: Sebutkan nama Allah menuju prang sabil
Perang Mujahiddin adalah perang di jalan Allah
Bila mati syahid di medan perang
Kelak Allah berikan bidadari di surga

*Tajak lampurang bek kuyue hatee
Bah aneuk beudee keuneong bak dada
Aneuk meureuyam keu bantai susoon
Aneuk boom atom payong urou kha*

Artinya: Pergi berperang tak usah gentar
Sekalipun anak pelor kena di dada
Anak meriam jadikan bantal susun
Anak bom atom jadikan payung di hari panas

*Jak kudo do kudoda idi
Banta saidi beureujang raya
Menyo rayeek baita saidi
Jak prang sabil lawan Beulanda*

Artinya: Marilah tidur anakku sayang
Cepatlah besar hai anakku
Bila besar hai putraku
Pergilah berperang melawan Belanda

³² *Ibid.* Mati syahid adalah suatu kepercayaan bagi pemeluk agama Islam dimana apabila seseorang gugur ataupun tewas dalam sebuah peperangan yang *notabene* adalah perang sabil, maka orang yang gugur tersebut akan langsung masuk ke dalam surga. *Ibid.*, hlm. 69.

³³ TGK. A.K. Jakobi, *op.cit.*, hlm253 – 254.

*Jak kudo do kudoda idang
Bungeong keumang lam istana
Menyo rayeek banta seudang
Jak taganyang kaphe Beulanda*

Artinya: Marilah kuayun anakku sayang
Bunga mekar dalam istana
Bila kau sudah besar kelak
Pergilah ganyang kafir Belanda

Puisi di atas berisikan kata-kata hiperbolis yang mampu membangkitkan semangat rakyat Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda walaupun sampai mengorbankan nyawa mereka. Hikayat Perang Sabil menjadi penggerak utama bagi rakyat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda. Adapun cara penyampaian puisi yang mengandung semangat berperang melawan penjajahan Belanda tersebut adalah seperti melantunkan lagu pengantar tidur yang disampaikan oleh para ibu-ibu pada umumnya kepada anak mereka dengan menyiratkan pesan agar setelah dewasa kelak mereka pergi berperang untuk melawan kekejaman penjajah Belanda yang telah membunuh nenek moyang rakyat Aceh dalam Perang Aceh terdahulu.³⁴

Kemudian sebagai kelanjutan dari Maklumat Bersama Ulama seluruh Aceh pada 15 Oktober 1945, maka pada 17 November 1945 dibentuklah suatu laskar yang bernama Lasykar Mujahidin.³⁵ Laskar ini dibentuk di ruang belakang Mesjid Raya Baitur Rahman di Kutaraja di bawah pimpinan seorang Ulama besar Aceh yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Selanjutnya, segera dibentuk juga cabang-cabangnya di tiap Luhak (Kabupaten), wilayah (Kewedanan) dan Kenegerian

³⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁵ Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektip Sejarah*, *op. cit.*, hlm. 70.

(Kecamatan). Kemudian Lasykar Mujahidin ini dinamakan Divisi Teungku Chik Di Tiro yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dan Cet Mat Rahmany, sedangkan laskar yang di Aceh Timur dinamakan Divisi Teungku Chik Paya Bakong di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid dan Ajd. Munsyi.³⁶

II. 2. Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API)

Agar kemerdekaan dapat dipertahankan, maka diperlukan sebuah organisasi perjuangan bersenjata di Aceh. Pada tanggal 27 Agustus 1945 dibentuklah Angkatan Pemuda Indonesia (API).³⁷ Singkatan ini dapat diartikan juga sebagai Angkatan Perang Indonesia.³⁸ Pembentukan organisasi ini kemudian meluas ke seluruh daerah Aceh. Di tiap-tiap kabupaten didirikan Wakil Markas Daerah (WMD) tepatnya berjumlah delapan WMD yang setingkat dengan Resimen di Kutaraja, Sigli, Bireun, Lhok Sukon, Langsa, Kutacane, Meulaboh dan Tapaktuan.³⁹ API diresmikan sebagai Pasukan Resmi Negara oleh Teuku Nyak Arief pada tanggal 12 Oktober 1945 lalu dalam perjalanannya sebagai bagian dari kekuatan Republik Indonesia API berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kemudian pada bulan Maret 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi Gajah I Aceh.⁴⁰ Adapun status Teuku Nyak Arief pada waktu itu sudah diangkat menjadi Residen Negara

³⁶ *Ibid.*

³⁷ TGK. A.K. Jakobi, *op.cit.*, hlm. 132.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

Republik Indonesia Aceh oleh Pemerintah Pusat tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1945. Mengenai struktur API di Aceh adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Markas Daerah (MD) API, berkedudukan di Kutaraja
 - Komandan : Syamaun Gaharu
 - Kepala Staf : Teuku Hamid Azwar
 - Sekretaris : Husin Yusuf
 - Anggota-anggota : Nyak Neh Rika
Said Usman
Said Ali
T.M. Daud Samalanga
Teuku Sarong
Bachtiar Idham
T. Abdullah (PM)
Saiman
2. Wakil Markas Daerah I (WMD-I), berkedudukan di Kutaraja di bawah pimpinan Nyak Neh dengan Komandan-Komandan Pasukannya:
 - Said Ali : Kutaraja
 - Usman Nyak Gade : Kutaraja
 - Said Abdullah : Kutaraja
 - Teuku Manyak : Seulimeum
3. Wakil Markas Daerah II (WMD-II), berkedudukan di Sigli di bawah pimpinan T.A. Rahman dengan Komandan-Komandan Pasukannya:
 - T. Rica : Sigli
 - Abdul Gani : Sigli
 - T. Abdullah : Lam Meulo
 - Hasballah Haji: Meureudu
4. Wakil Markas Daerah III (WMD-III), berkedudukan di Bireuen di bawah pimpinan Teuku M. Daud (Samalanga) dengan Komandan-Komandan Pasukannya:
 - Teuku Hamzah : Samalanga
 - Agus Hussin : Bireuen
 - Hussein Yusuf : Bireuen
5. Wakil Markas Daerah IV (WMD-IV), berkedudukan di Lhok Sukon di bawah pimpinan T. Muhammad Syah/Ibrahim Hatta dengan Komandan-Komandan Pasukannya:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 134 – 137.

Hasbi Wahidy : Pantan labu
Nurdin Hatta Adjad Musi : Lhok Sukon
A. Gani Dadeh
T. Usman Mahmud : Lhok Seumawe
T. Zulkifli

6. Wakil Markas Daerah V (WMD-V), berkedudukan di Langsa di bawah pimpinan Bachtiar Dahlan dengan Komandan-Komandan Pasukannya:

Ayub : Langsa
Nurdin Sufi : Idi
Daud Malem : Simpang Ulin
B. Nainggolan : Kuala Simpang
Abu Samah : Kuala Simpang
Peutua Husin : Langsa

7. Wakil Markas Daerah VI (WMD-VI), berkedudukan di Kutacane di bawah pimpinan Muhammad Din dengan Komandan-Komandan pasukannya:

Bahrin : Kutacane
Maaris : Kutacane
Maat : Blangkejeren
A. Rahim : Kutacane
A. Jalim Umar: Balngkejeren

8. Wakil Markas Daerah VII (WMD-VII), berkedudukan di Meulaboh di bawah pimpinan T. Usman Jakoub/T. Cut Rahman dengan Komandan-Komandan Pasukannya:

Hasan Ahmad : Meulaboh
Rakub
Hamidy Hs : Suak Timah
A. Hanafiah : Meulaboh
T. Geudong : Meulaboh
A.K. Jailani : Calang
Indah

9. Wakil Markas Daerah VIII (WMD-VIII), berkedudukan di Tapaktuan di bawah pimpinan M. Nazir/Nyak Adam Kamil dengan Komandan-Komandan Pasukannya:

Abdullah Sani : Tapaktuan
HM Syarief : Blang Pidie
BB Jalal
Nyak Hukum : Bakongan
Iskandar

II. 3. Perjuangan Melawan Agresi Militer Belanda

Agresi Militer Belanda I

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militernya yang pertama di Aceh.⁴² Menghadapi agresi militer Belanda tersebut, pasukan-pasukan TRI dengan sigap mengawal sebagian besar pantai Aceh.⁴³ Selain pasukan TRI, di Aceh juga telah terdapat barisan-barisan kelaskaran lainnya, yaitu Divisi Rencong Kesatria Pesindo, Divisi X Teungku Chiek Di Tiro dan Divisi Teungku Chiek Paya Bakong.⁴⁴ Dari ketiga divisi tersebut, Divisi Rencong merupakan Divisi yang susunannya paling teratur dan mempunyai persenjataan yang lebih lengkap.⁴⁵ Pemimpin Umum Divisi ini adalah A. Hasjmy dan Komandannya adalah Nyak Neh Lhok Nga. Divisi Rencong ini mengikuti susunan kemiliteran dan memiliki potensi sebagai berikut; Resimen I di Kutaraja pimpinan A. Gani Adam, Resimen II di Sigli pimpinan Putih Mauni, Resimen III di Lhok Seumawe pimpinan Teuku Syamaun Latif, Resimen IV di Takengon pimpinan M. Zaharuddin, Resimen V di Langsa pimpinan Teungku Usman Azis, Resimen VI di Meulaboh pimpinan H. Daud Dariah, Resimen VII di Tapak Tuan pimpinan M. Sahim Hasymi, Resimen Wanita Pocut Baren di Kutaraja pimpinan Mayor Zahara dan yang terakhir adalah Batalyon Istimewa Artileri pimpinan Nyak Neh.⁴⁶

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1983, hlm. 110.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Barisan berikutnya, Divisi Teungku Chiek Di Tiro, berada di bawah pimpinan Chek Mat Rahmany. Divisi ini terdiri dari Resimen I di Kutaraja dengan Komandan Said Usman, Resimen II di Sigli dengan Komandan Said Usman, Resimen III di Bireuen dan Langsa dengan Komandan A. Mythalib, Resimen IV di Meulaboh dengan Komandan Teungku Hasan Hanafiah, lalu Resimen V di Takengon dan Kutacane dengan Komandan Ilyas Leube. Lalu Divisi yang ketiga, Divisi Teungku Chiek Paya Bakong, bermarkas besar di Idi dengan Teungku Amir Husin Al Mujahid sebagai Panglimanya dan Ajad Musi sebagai pelaksana tugas Panglima. Divisi ini mempunyai 3 bagian, yaitu Batalyon Divisi Berani Mati, Tentara Keamanan Rakyat, dan Staf Istimewa.⁴⁷

Selain dari itu terdapat juga Barisan Hisbullah yang diprakarsai oleh Ulama-ulama di Aceh seperti Teungku H. Hasan Krueng Kale, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, Teungku Hasballah Indrapuri, Teungku A. Whab Seulimum dan lainnya. Barisan ini terdiri dari Ulama-ulama, orang dewasa dan orang tua yang belum tergabung ke dalam laskar apapun. Berbagai barisan kelaskaran ini diharapkan dapat membantu tentara resmi yaitu TRI dalam menghadapi Belanda.⁴⁸

Dalam Agresinya tersebut, Belanda melancarkan serangan udara terhadap Lhok Nga, sebuah lapangan terbang dekat Kutaraja. Pesawat Belanda tersebut datang dari Sabang melalui Ulee lheue, serangan tersebut berlangsung sekitar 30 menit.⁴⁹ Lhok Nga merupakan pangkalan Udara RI di Aceh yang tangguh dan memiliki

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 108 – 109.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

perlengkapan perang yang cukup baik menurut ukuran masa itu. Untuk mengatasi hal ini, maka pada 12 Agustus 1947 dibentuklah suatu badan Koordinasi Daerah Aceh di Kutaraja yang dihadiri oleh berbagai partai dan organisasi seperti MASYUMI, PNI, Pesindo, PGRI, PUSA dan Muhammadiyah. Sebagai ketuanya adalah Amelz, dibantu oleh Osman Raliby dan M. Abduh Syam. Tujuan Badan Koordinasi Daerah Aceh ini adalah mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan, membentuk Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, membentuk pemerintahan yang kokoh, melakukan mobilisasi umum dan yang terakhir menyesuaikan kehidupan politik, ekonomi dan sosial untuk kepentingan pertahanan Indonesia.⁵⁰

Belanda berencana menguasai Aceh dari daerah Sumatera Timur terlebih dahulu, untuk itu rakyat Aceh pun turut membantu dalam menghadapi pasukan Belanda di Medan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah *long march* ke front Medan Area.⁵¹ Kemudian untuk mengkoordinasi rakyat Aceh yang tergabung dalam berbagai pasukan dan laskar, maka dibentuklah Resimen Istimewa Medan Area (RIMA). RIMA dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad, kemudian Mayor Tjut Rahman.⁵² Susunan dan kedudukan RIMA adalah sebagai berikut:⁵³

1. Batalyon I dipimpin oleh Kapten Hanafiah, berkedudukan di Kp. Ralang.
2. Batalyon II dipimpin oleh Kapten Nyak Adam Kamil, berkedudukan di Kerambil Lima.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

⁵¹ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 254.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, *op. cit.*, hlm. 109.

⁵³ *Ibid.*

3. Batalyon III berkedudukan di Kelumpang. Pemimpin pertamanya adalah Kapten Alamsyah kemudian Kapten Ali Hasan dan Kapten Hasan Saleh.
4. Batalyon IV dipimpin oleh Kapten Burhanuddin, berkedudukan di Binjai.
5. Batalyon di bawah pimpinan Wiji Alfiah, berkedudukan di Sunggal.
6. Batalyon dari Divisi Rencong di bawah pimpinan Mayor Nyak Neh, berkedudukan di Kampung Lalang.

Pengiriman pasukan ke Medan Area, yang bermarkas besar di Binjai ini juga didasari oleh adanya radiogram Panglima Komando Tertinggi Sumatera kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada saat Agresi Militer Belanda berlangsung. Pada saat itu kota Medan (Sumatera Timur) telah jatuh ketangan Belanda.⁵⁴ Isi radiogram tersebut adalah sebagai berikut:

radiogram
 dari : panglima sumatera
 untuk : pemimpin-pemimpin rakyat Aceh
 isi :
 pengembalian kota medan terletak
 di tangan saudara2 segenap
 penduduk aceh titik
 jangan sangsi titik
 alirkan terus kekuatan aceh ke medan
 dan jangan berhenti sebelum medan
 jatuh titik habis⁵⁵
 soehardjo hardjowardoyo
 mayor jenderal tni-ad

Dengan demikian jelaslah dapat dikatakan bahwa selama Agresi Militer Belanda pada tahun 1947 berlangsung, di Aceh telah terdapat suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai pasukan dan laskar yang bertujuan untuk menggagalkan usaha Belanda menjajah kembali daerah-daerah Indonesia khususnya Sumatera. Kemudian sebagai contoh nyatanya adalah rakyat Aceh dengan tegas mengerahkan kekuatan ke

⁵⁴ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 255.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 290.

Medan Area yang menghasilkan keberhasilan dalam membendung usaha Belanda memasuki Aceh melalui Daerah Sumatera Timur.⁵⁶

Agresi Militer Belanda II

Pada akhir tahun 1948, Belanda kembali melakukan agresi militernya di Aceh. Pada masa ini, kekuatan bersenjata Aceh seperti gerakan kepanduan dan laskar-laskar telah masuk dan menyatu ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintahan sipil pun telah mempunyai aparat sampai ke pelosok desa. Jadi, dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua ini, keadaan sudah lebih baik dan terorganisir dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua ini, pemimpin-pemimpin Aceh mempersiapkan 6 rencana jitu. Pertama, mereka/para pemimpin di Aceh mempersiapkan kekuatan senjata untuk berperang gerilya serta menjelaskan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua ini. Tugas ini diserahkan kepada Badan penerangan dari partai-partai dan organisasi massa lainnya. Kedua, mempersiapkan tambahan senjata dari luar negeri, terutama dari Malaya. Senjata-senjata ini diangkut atau diselundupkan oleh TNI dengan bekerjasama dengan para saudagar. Ketiga, mempersiapkan aparat-aparat yang sudah mengenal tempat-tempat vital seperti lapangan udara, pemancar radio dan lain-lainnya. Keempat, mempersiapkan dana

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, *op. cit.*, hlm. 114.

yang diperlukan untuk biaya pertahanan Aceh dan untuk biaya pasukan di Sumatera Timur. Biaya ini diperoleh dari para diplomat RI di luar negeri dan pedagang-pedagang Aceh. Rencana ke-lima adalah mempersiapkan logistik dan menentukan lokasinya jika terjadi perang gerilya. Rencana terakhir adalah mempersiapkan lokasi baru untuk pasukan untuk menjaga-jaga kemungkinan kota direbut oleh Belanda.⁵⁷ Rencana-rencana ini terbukti jitu dalam menghadapi agresi militer Belanda. Hal ini dapat terlihat dengan tidak dapat dikuasainya Aceh oleh Belanda sehingga oleh Bung Karno Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Modal”. Dalam perannya sebagai “Daerah Modal”, Aceh melalui masyarakatnya menyumbangkan pesawat yang diberi nama “Seulawah RI-001” kepada Republik Indonesia yang memang sangat diperlukan dalam tahap perjuangan kemerdekaan pada 1948.⁵⁸ Dana yang terkumpul untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan bersama rakyat Aceh terutama sekali dari GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh).⁵⁹

II. 4. Struktur Pemerintahan di Aceh pada Masa Revolusi

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan bahwa Indonesia terbagi atas delapan Propinsi, yaitu:⁶⁰

1. Propinsi Jawa Barat
2. Propinsi Jawa Tengah
3. Propinsi Jawa Timur
4. Propinsi Sumatera

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 119 – 120.

⁵⁸ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 277

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hlm. 19.

5. Propinsi Kalimantan
6. Propinsi Sulawesi
7. Propinsi Maluku
8. Propinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

Aceh termasuk di dalam Propinsi Sumatera. Setiap Propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan setiap Propinsi dibagi lagi atas keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Sebagai Gubernur Propinsi Sumatera ditetapkan Mr. T.M. Hasan. Kemudian sebagai proses kelancaran roda pemerintahan seluruh Sumatera, pada 28 April 1947 ditetapkan Sumatera sebagai Daerah Otonom.⁶¹ Keresidenan Aceh merupakan bagian dari Propinsi Sumatera dengan Teuku Nyak Arief sebagai Residen pertama dan Ketua Nasional Daerah Aceh yaitu Tuanku Mahmud. Pada Januari 1946, Residen Teuku Nyak Arief digantikan oleh Teuku Chik Muhammad Daudsyah.⁶² Meskipun Teuku Nyak Arief hanya 4 bulan menjadi Residen di Aceh, namun dia sudah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang vital dan mewujudkan dasar-dasar pemerintahan RI yang permanen sehingga Residen yang baru dapat meneruskan ide-idenya. Masalah pertama yang berhasil dia atasi adalah masalah pertahanan negara yang mengharuskan pemerintah daerah dalam waktu singkat harus dapat mengorganisasi kekuatan bersenjata di Aceh. Kedua, masalah tentara pendudukan Jepang yang masih tersisa di Aceh dan kedatangan utusan sekutu. Masalah terakhir adalah masalah perpecahan antara kaum Ulama dengan Uleebalang.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, *op.cit.*, hlm. 66.

⁶³ *Ibid.*

Sejak Sumatera menjadi Daerah Otonom, di daerah Aceh telah ada konsolidasi pemerintahan yang dilakukan dengan cara mengganti struktur pemerintahan kolonialis Belanda di Aceh.⁶⁴ Berikut adalah perubahan struktur pemerintahan dari zaman pemerintahan kolonial Belanda menjadi struktur pemerintahan Republik Indonesia:

Keresidenan Aceh pada masa pemerintahan kolonialis Belanda

Keresidenan Aceh dibagi atas beberapa *Afdeling* yang dikuasai oleh Assisten Residen. *Afdeling-afdeling* tersebut adalah:⁶⁵

1. *Afdeling* Aceh Besar dengan ibukotanya Kutaraja, terbagi atas 4 *Onderafdeling*, yaitu:
 - a. Kutaraja beribukota di Kutaraja
 - b. Seulimeum beribukota di Seulimeum
 - c. Lhoknga beribukota di Lhoknga
 - d. Sabang beribukota di Sabang
2. *Afdeling* Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh, terbagi atas 6 *Onderafdeling*, yaitu:
 - a. Meulaboh beribukota di Meulaboh
 - b. Calang beribukota di Calang
 - c. Tapaktuan beribukota di Tapaktuan
 - d. Bakongan beribukota di Bakongan
 - e. Singkil beribukota di Singkil
 - f. Simeulu beribukota di Sinabang
3. *Afdeling* Aceh Utara dengan ibukotanya Sigli, terbagi atas 6 *Onderafdeling*, yaitu:
 - a. Sigli beribukota di Sigli
 - b. Lameulo beribukota di Lameulo
 - c. Meureudu beribukota Meureudu
 - d. Bireuen beribukota di Bireuen

⁶⁴ Tim Monografi Daerah Aceh, *op. cit.*, hlm. 16 – 17.

⁶⁵ *Ibid.*

- e. Takengon beribukota di Takengon
 - f. Lhokseumawe beribukota di Lhok Seumawe
4. *Afdeling* Aceh Timur ibukotanya Langsa, terbagi atas 6 *Onderafdeling*, yaitu:
- a. Langsa beribukota di Langsa
 - b. Idi beribukota di Idi
 - c. Lhoksukon beribukota di Lhok Sukon
 - d. Tamiang beribukota di Kuala Simpang
 - e. Tanah Alas beribukota di Kutacane
 - f. Gayo Luas dan Serbajadi beribukota di Blang Keujeren

Selanjutnya *Onderafdeling-nderafdeling* tersebut dibagi lagi atas *distrik-distrik* atau *Lanschap* yang dipimpin oleh seorang Uleebalang. Distrik ini dibagi pula atas *mukim* dan selanjutnya atas *gampong*.

Struktur pemerintahan di Aceh pada masa pendudukan Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang sistem pemerintahan ini pada umumnya diteruskan oleh Jepang, hanya saja namanya diganti dengan istilah Jepang dan juga pejabat-pejabatnya diganti orang-orang Jepang. Berikut adalah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Jepang.⁶⁶

1. Keresidenan diganti menjadi *Syuu*.
2. Residen diganti menjadi *Syuu Tyokan*, dijabat oleh pembesar Jepang.
3. *Afdeling* diganti dengan *Bunsyu*, dikepalai oleh *Bunsyutyo*, yang juga pejabat Jepang.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

4. *Onderafdeling* diganti menjadi *Gun*, dikepalai oleh *Guntyo*. Jabatan ini kebanyakan dijabat oleh orang Indonesia kecuali di Sabang, Sinabang, Singkil dan Kutacane.
5. *Lanschap* diganti menjadi *Son*, dikepalai oleh *Sontyo* yang dijabat oleh orang Indonesia.
6. Mukim menjadi *Ku*, dikepalai oleh *Kutyo*.
7. Gampong diganti menjadi *Kumi*, dikepalai oleh *Kumityo*.

Walaupun terdapat orang Indonesia yang diberi wewenang dalam pemerintahan seperti menjadi *Guntyo* dan *Sontyo*, namun sebenarnya segala roda pemerintahan dari tingkat yang tinggi sampai yang rendah seperti di desa diatur dan ditentukan oleh Jepang juga. Segala dana dan kekuatan harus diupayakan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Struktur pemerintahan di Aceh pada masa revolusi kemerdekaan (1945 – 1949)

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan-perubahan struktur pemerintahan di berbagai daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Daerah *Lanschap* diganti namanya dengan Negeri (sekarang kecamatan) dan dilakukan pemilihan Dewan Pemerintah Negeri yang terdiri dari 5 orang.
2. *Onderafdeling* dirubah menjadi Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

3. *Afdeling* menjadi Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak. Untuk membantu Kepala-kepala Daerah masing-masing, dibentuk juga Komite Nasional Daerah pada tingkat Keresidenan, Luhak dan Wilayah.

Lalu sehubungan dengan situasi negara dalam keadaan gawat akibat dari agresi Belanda, maka dengan Keputusan Wakil Presiden pada 26 Agustus 1947, Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer dengan Teungku Muhammad Daud Beureu'eh sebagai Gubernur Militer-nya.⁶⁸

Pada 15 April 1948 ditetapkan Undang-undang No.10 tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan.⁶⁹ Propinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Untuk pelaksanaannya pada taraf pertama dibentuklah Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera yang bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Mr. T. Moh. Hasan diangkat menjadi Ketua Komisariat yang berkedudukan di Bukit Tinggi.⁷⁰ Sebagai Gubernur Sumatera Utara diangkat Mr. S.M. Amin pada 19 Juni 1948 yang dilantik oleh Presiden di Kutaraja.⁷¹ Pada 12 Desember 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara mengadakan sidangnya di Tapaktuan, sidang itu antara lain memutuskan Kutaraja

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

⁷¹ *Ibid.*

sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara dan memilih lima orang anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.⁷²

Lalu berdasarkan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949 No. 23/Pem/PDRI, S.M. Amin yang merupakan Gubernur Sumatera Utara diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, sedangkan kekuasaan sipil dan militer untuk daerah Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo dipusatkan kepada Teungku Muhammad Daud Beureu'eh selaku Gubernur Militer.⁷³ Di tiap-tiap Keresidenan Pemerintahan sipil dijalankan oleh Wakil Pertahanan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Militer. Dewan Pemerintahan Daerah Aceh berkedudukan di Kutaraja dengan Residen T.M. Daudsyah sebagai ketuanya dan anggota-anggota Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara adalah M. Nur El Ibrahimy, M. Yunan Nasution, Yahya Siregar dan Amelz.⁷⁴

Pada akhir 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan dibentuk menjadi Propinsi tersendiri yang wilayahnya meliputi Keresidenan Aceh terdahulu ditambah dengan sebagian dari daerah Kabupaten Langkat yang terletak di luar daerah "Negara Bagian" Sumatera Timur.⁷⁵ Propinsi Aceh ini merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang pada 1949 merupakan salah satu Negara Bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sebagai Gubernur Propinsi

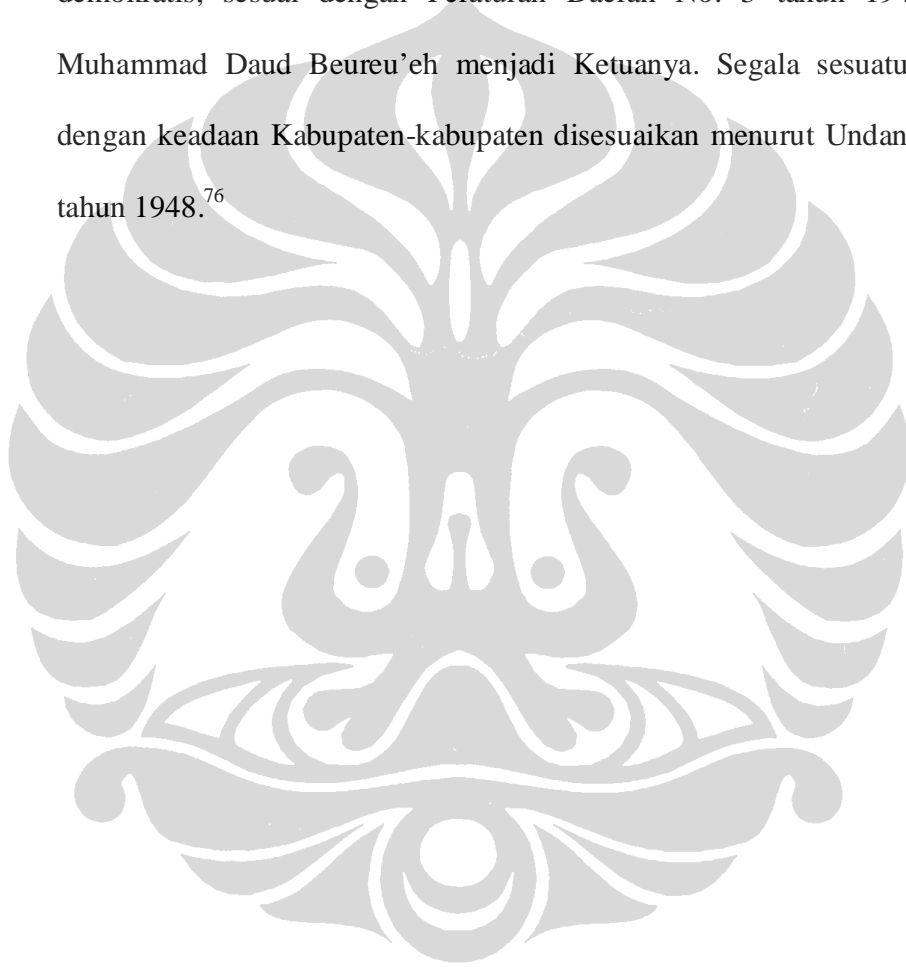
⁷² *Ibid.*

⁷³ Mr. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*. Jakarta: Soeroengan, 1957, hlm. 27.

⁷⁴ Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hlm. 74.

⁷⁵ *Op. cit.*, hlm. 28.

Aceh diangkat Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, yang merupakan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Setelah terbentuknya Propinsi Aceh yang pertama ini, maka dibentuk juga Dewan Perwakilan Rakyatnya yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1946, lalu Teungku Muhammad Daud Beureu'eh menjadi Ketuanya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keadaan Kabupaten-kabupaten disesuaikan menurut Undang Undang No. 22 tahun 1948.⁷⁶



⁷⁶ *Op. cit.*, hlm. 75.

BAB III

PERGERAKAN AWAL PUSA 1939 – 1945

III. 1. Proses Terbentuknya PUSA

PUSA lahir dalam situasi masyarakat Aceh yang sebagian besar Ulama dan pengikutnya berpandangan sempit dan kolot dalam memahami Islam. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berasal dari negeri Barat seperti bahasa Inggris, dipandang tabu oleh masyarakat bahkan sebagian besar Ulama mengharamkannya karena beranggapan bahwa bahasa Inggris tidak termasuk dalam lingkungan ilmu dan kebudayaan Islam. Hal inilah yang menjadi perhatian dari seorang Ulama terkemuka di Aceh, Teungku Abdur Rahman Matang Glumpangdua, yang menganggap bahwa Ulama yang berpandangan sempit merupakan golongan yang anti kemajuan agama. Di bawah ini adalah pernyataan Ismuha mengenai ide dari Teungku Abdur Rahman sebagaimana yang terdapat pada disertasi M. Daud Remantan sebagai berikut:

Untuk menghindarkan satu penyakit yang amat berbahaya ini, terpikirlah oleh beliau suatu cara, yaitu mengusahakan satu persatuan antar Ulama-ulama di seluruh Aceh, supaya tidak dapat dikutak-katikkan orang lagi menjadi perkakas yang berguna bagi musuh. Dan kalau persatuan ini telah tercapai menurut beliau maka tidak ada lagi orang yang mau membuang umurnya untuk mempersoalkan masalah khilafiah yang kecil-kecil yang tidak akan habis-habisnya sampai kiamat dunia.⁷⁷

Pernyataan Teungku Abdur Rahman, yang merupakan ide awal untuk pembentukan PUSA tersebut, sejalan dengan pemikiran dari dua Ulama Aceh lainnya, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dan Teungku Ismail Yakub.

⁷⁷ Drs. M. Daud Remantan, *Pembaharuan Pemikiran Islam di Aceh (1914 – 1953)*. Disertasi Doktoral IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, 1985, hlm. 274. Tidak diterbitkan.

Teungku Muhammad Daud Beureu'eh berfikir bahwa perlu diadakannya penyeragaman rencana pelajaran (*leerplan*) yang bertujuan untuk memudahkan pelajar pindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Pemikirannya ini dia sampaikan kepada Teungku Abdur Rahman untuk direalisasikan. Ide mengenai pembentukan PUSA juga terlihat dari pernyataan Teungku Ismail Yakub yang terdapat dalam disertasi M. Daud Remantan sebagai berikut:

Alangkah baiknya di Aceh ini didirikan persatuan Ulama, seperti yang saya lihat di Sumatera Barat. Sekolah Normal Islam Padang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Kita merasa senang melihat bersama-sama Enyik Rasul, Syekh Musa Parabek, Syekh Ismail Jambek, Enyik Jaho, Buya Daud Mansur, dan lain-lain.⁷⁸

Adapun menurut Teungku Ismail Yakub keinginan untuk membentuk persatuan yang teratur diantara para Ulama ini mempunyai tujuan yang didasarkan pada firman Allah. Tujuannya yang pertama adalah *Litta'aruf*, yaitu berkenal-kenalan sesama anggota, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Hujurat, ayat 13, yang artinya: "...Sesungguhnya kami jadikan kamu berkaum-kaum dan berkabilah-kabilah. Supaya kamu berkenal-kenalan". Hal ini sangat dirasakan antar Ulama Aceh yang selama ini saling terpisah, tidak tahu-menahu antara satu dengan yang lainnya. Tujuan yang kedua adalah *Littasyawur* yaitu saling berembuk, bermusyawarah dan membicarakan kepentingan-kepentingan Agama. Hal ini pun didasari pada firman Allah dalam surat Asy Syura, ayat 38 yang artinya: "...urusan mereka dilakukan dengan permusyawaratan di antara mereka...".⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 275.

⁷⁹ Tgk. Ismail Ja'coeb, "Pergerakan di Atjeh Dalam 10 Tahoen" dalam *Sinar*, Mei 1940, hlm. 192.

Sebagai tindakan lebih lanjut, Teungku Abdur Rahman bertemu dengan Teungku Ismail Yakub di Blang Jruen. Setelah memenuhi undangan sebagai pembicara dalam suatu perayaan Maulid, Teungku Abdur Rahman berdiskusi dan menyatukan pendapat dengan Teungku Ismail Yakub, pembicaraan mereka sampai pada suatu ide untuk mendirikan sebuah organisasi Ulama sebagai suatu jalan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Aceh.⁸⁰ Sepulang dari Blang Jruen, Teungku Abdur Rahman menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Teungku Ismail Yakub kepada kawan-kawan dan pengikutnya di Matang Glumpangdua, terdapat diantaranya adalah Teungku Usman Azis yang juga merupakan seorang guru Madrasah Al-Muslim Peusangan.⁸¹

Setelah mendengarkan hasil pembicaraan tersebut, mereka sepakat menyebarkan ide pembentukan organisasi Ulama tersebut ke seluruh daerah di Aceh. Penyampaian ide tersebut diterima baik oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Setelah penyebaran berita mengenai pembentukan organisasi ulama telah dilakukan, Teungku Abdur Rahman mengundang Ulama yang terkemuka di Aceh untuk menghadiri musyawarah antar Ulama yang akan dilangsungkan pada 5 Mei 1939 di Matang Glumpangdua⁸². Musyawarah antar Ulama itu menghasilkan keputusan bulat untuk membentuk sebuah organisasi Ulama yang bernama

⁸⁰ Tim penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 143.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dalam musyawarah tersebut juga ditentukan pengurus PUSA yang hasilnya adalah sebagai berikut:⁸³

Ketua I : Teungku Muhammad Daud Beureu'eh
Ketua II : Teungku Abdur Rahman
Setia Usaha I : Teungku M. Nur El Ibrahimy
Setia Usaha II : Teungku Ismail Yakub
Bendahara : T.M. Amin
Komisaris :
1. Teungku Abd. Wahab Keunalo Samalanga
2. Teungku Syekh Haji Abd. Hamid Samalanga
3. Teungku Usman Lampoh Awe
4. Teungku Yahya Baden Peudada
5. Teungku Mahmud Simpang Ulim
6. Teungku Ahmad Damanhuri Takengon
7. Teungku M. Daud
8. Teungku Usman Azis Lho'Sukon

Sesuai dengan anggaran dasar PUSA yang menetapkan bahwa Pengurus Besar (*Hoofdbestuur*) berkedudukan di tempat kedudukan Ketua I dan Setia Usaha I yaitu di Sigli.⁸⁴

Pro dan kontra pun muncul setelah PUSA terbentuk, sebagian Uleebalang yang tidak menghendaki Sultanat Aceh berdiri kembali mengartikan bahwa PUSA merupakan singkatan dari Persatuan Untuk Sultanat Aceh. Dengan kembali berdirinya Sultanat Aceh maka kekuasaan para Uleebalang akan dibatasi oleh Sultan dan mereka tidak menghendaki hal itu terjadi. Namun, pernyataan itu disanggah oleh Ulama yang tergabung dalam PUSA dengan mengatakan bahwa organisasi ini murni untuk memajukan pendidikan di Aceh. Ditambah juga bahwa di dalam struktur organisasi PUSA sendiri pun merekrut personel dari golongan Uleebalang yaitu

⁸³ Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, op. cit., hlm. 50.

⁸⁴ *Ibid.*

Teuku M. Amin sebagai bendahara dan tempat untuk bermusyawarahnya pun PUSA mendapatkan izin untuk melakukannya di daerah Peusangan yang merupakan daerah kekuasaan Uleebalang Peusangan Teuku Haji Chik Mohammad Johan Alamsyah.⁸⁵ Sedangkan dari kaum Ulama sendiri ada juga yang tidak sejalan dengan pembentukan PUSA. Mereka ini diantaranya adalah Ulama Besar Teungku Hasan Krueng Kale dan Teungku Syekh Ibrahim Lam Nga, yang lebih dikenal dengan panggilan Ayahanda.⁸⁶

Tiga bulan setelah PUSA didirikan, Pengurus Besar PUSA mengadakan rapat untuk membicarakan usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Rapat ini menghasilkan empat keputusan yaitu rencana untuk membuka Normal Islam Institut(NII) di Bireuen dalam waktu dekat, menetapkan Teungku M. Nur El Ibrahimy menjadi Direktur NII, mengangkat T.M. Amin menjadi Sekretaris I Pengurus Besar PUSA, dan yang terakhir mengangkat Teungku Mustafa Ali menjadi Bendahara PUSA.⁸⁷

III. 2. PUSA pada Masa Penjajahan Belanda 1939 – 1942

III. 2. 1. Mendirikan Normal Islam Institut

Normal Islam Institut (NII) merupakan sekolah guru yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, singkatnya agar kurikulum madrasah dapat diseragamkan.⁸⁸ Guru-guru

⁸⁵ Tim penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia, *loc. cit.*, hlm. 144.

⁸⁶ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 299.

⁸⁷ *Penjoeloeh* tahun-II, No.5 – 6 Maret – April, 1941, hlm. 59.

⁸⁸ *Santunan*, Tahun II, Juli – Agustus 1947, No.12, hlm. 8.

tersebut diharapkan bukan hanya pandai mengaji, melainkan juga harus mempunyai pengetahuan umum sehingga dapat mengajarkan pengetahuan umum tersebut kepada murid-murid madrasah dan masyarakat umum. Untuk memimpin NII, ditunjuk Teungku M. Nur El Ibrahimy, seorang lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo. Awalnya Normal Islam Institut rencananya akan dibuka pada 15 Desember 1939, namun karena adanya *Onderwijs Verbod* (larangan mengajar) oleh pemerintah Belanda yang ditujukan kepada Teungku M. Nur El Ibrahimy, maka pembukaannya diundur menjadi 27 Desember 1939.⁸⁹ Larangan mengajar tersebut didapatkannya selama masa waktu 2 tahun saat dia mengajar di Madrasah Nahdlatul Islam di Idi. Masalah mengenai larangan mengajar tersebut pun pada akhirnya usai sudah setelah Ketua I dan II PUSA yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dan Teungku abdur Rahman menghadap Asisten Residen Aceh Utara di Sigli. Mereka (Ketua PUSA) bersikeras bahwa urusan yang berkaitan dengan Teungku M. Nur El Ibrahimy murni merupakan urusan sekolah bukan politik. Akhirnya Asisten Residen tersebut memberi izin dengan syarat penguasa daerah Peusangan yaitu Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah sebagai *Beschermer* (pelindung) PUSA menjamin tidak akan terjadi kegiatan untuk melawan pemerintahan Belanda dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mencampuri dalam urusan politik.⁹⁰

Pada tahun 1940, PUSA membeli bekas gedung *Javasche Bank* cabang Bireuen disimpang empat jalan ke Takengon. Pada tahun pertamanya, tenaga guru di

⁸⁹ Ismuha, "Lahirnja Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 Tahun Jang Lalu" dalam *Sinar Darussalam* no. 14, 1969, hlm. 46.

⁹⁰ *Ibid.*

NII hanya ada dua orang, yaitu Teungku M. Nur El Ibrahimy, yang juga menjabat sebagai pimpinan sekolah dan Teuku Muhammad Jangka. Lalu setelah NII menempati gedungnya sendiri dan telah bertambah dua kelas, maka tenaga guru ditambah dua orang lagi, yaitu Teungku Ismail Yakub dan Abdul Gani Usman.

Kurikulum NII mirip dengan kurikulum Normal Islam PGAI Padang dengan tahun ajaran yang sama, yaitu empat tahun.⁹¹ Mata pelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: Bahasa Arab, Agama, Ilmu Pendidikan, Pengetahuan Umum dan Bahasa. Kurikulum inilah yang rencananya dapat menunjang rencana PUSA selanjutnya untuk memenuhi tenaga guru yang memenuhi syarat dan cocok bagi sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh dengan leerplan/rencana pembelajaran yang diseragamkan. Lebih lengkapnya tentang kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:⁹²

1. Bahasa Arab, terdiri dari *Mutiala'ah*, *Insa'*, *Tarikual'adabi al'Arabiy*, *Al'Nahwu Waas Sarfu*, *Balagah*, *Al Kattual'Arabiyyu* dan *Mahfuzatun (Mahfuzah)*.
2. Agama, terdiri dari *Fiqh*, *Tarikuttasri'*, *Usulu alfiqh Tauhid*, *Hadist*, *Mustalah*, Tafsir, dan Tarikual Islam.

⁹¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara, 1992, hlm. 179.

⁹² *Santunan*, Tahun-II, Juli-Agustus, 1977, No. 12, hlm. 9. Arti dari ilmu-ilmu yang diajarkan dalam kurikulum tersebut antara lain: *Tarikual al'Arabiy* = Sejarah Arab, *Al Nahwu Waas Sarfu* = Ilmu Pengembangan Kata, *Balagah* = Pantun, *Mahfuzah* = Ilmu Hafal, *Usulu alfiqh Tauhid* = Ajaran Ketuhanan yang Utama, *Hadist* = Ajaran mengenai perbuatan dan perkataan Rasulullah, *Mustalah* = Ilmu Telaah, *Tafsir* = Ilmu Pengartian, *Tarikual Islam* = Sejarah Islam, *Tarbiyatun 'Ilmiyatun* = Pendidikan yang berilmu, *Tarbiyatun 'Amaliyah* = Pendidikan yang beramal, *'Ilmuan Nafsi* = Seorang yang berilmu dan *Staatrecht* = Ilmu Hukum Negara

3. Ilmu Pendidikan, terdiri dari *Tarbiyatun 'Ilmiyatun* (*Tarbiyah* Ilmiah), *Tarbiyatun 'Amaliyah* (*Tarbiyah* Amaliah), *Tarikuat Tarbiyati* (*Tarikuat* *Tarbiyah*) dan *'Ilmuan Nafsi*.
4. Pengetahuan Umum dan Bahasa, terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, Ilmu Alam, Ilmu Binatang, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Falak, Ilmu Hitung, Ilmu Bangun, Ilmu Kesehatan, Sejarah Indonesia, Sejarah Umum, Ilmu Bumi Indonesia, Ilmu Bumi Umum, *Staatrecht*, Ekonomi, *Boekhouding* dan Bahasa Inggris.

Dengan berdirinya NII, pelajar-pelajar tamatan sekolah agama yang berminat melanjutkan pelajarannya kini dapat memperolehnya di Aceh sendiri tanpa harus pergi ke daerah luar seperti Sumatera Barat, Jawa dan daerah lainnya. Melihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat NII terasa begitu bermanfaat di Aceh. NII merupakan wujud nyata dan persembahan pertama dari perjuangan PUSA untuk memajukan pendidikan di Aceh. Pada 1947, setelah Pemerintah Daerah mengambil alih madrasah-madrasah Islam yang ada di Aceh menjadi sekolah Pemerintah, NII dipindahkan ke Kutaraja (Banda Aceh) dan namanya diganti dengan SMI (Sekolah Menengah Islam) yang disantuni oleh Kantor Urusan Agama Daerah Aceh.⁹³ Sebagai direktur SMI dipilihlah Abdul Gani yang sebelumnya juga merupakan pengajar di NII Bireuen.

⁹³ Prof. Tgk. H. Ismail Yakub, "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh – Belanda Sampai Sekarang" dalam Ismail Suny (Ed), *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980, hlm. 363.

Selama perjalanannya, Normal Islam Institut (NII) telah banyak memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh terutama dalam membuka pikiran kolot yang umumnya masih dimiliki masyarakat Aceh. Contoh nyatanya adalah dengan diajarkannya pelajaran Bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam kurikulum NII. Kemampuan berbahasa Inggris tentunya menambah khasanah Bahasa bagi pelajar-pelajar NII walaupun kebanyakan para Ulama menganggapnya haram karena merupakan produk bangsa Barat. Akan tetapi lama-kelamaan karena kemampuan berbahasa Inggris tersebut digunakan untuk kemajuan rakyat Aceh, akhirnya pelajaran bahasa Inggris dapat diterima. Mengenai bagaimana pandangan masyarakat Aceh yang sedang membangun terhadap NII yang merupakan sekolah bentukan PUSA tersebut dapat dilihat dari puisi karya Abkamy berikut ini:⁹⁴

Sedang Aceh termenung cenung,
Ditindas untung malang gulana,
Tampak nun jauh terkatung-katung,
Itulah PUSA mulai menjelma.

Ulama Aceh bangun berbimbing tangan,
Hendak menyeberang samudera maya,
Menuju pulau yang diridhai Tuhan,
Hendak memajukan agama dan nusa.

Dikala PUSA telah menjelma,
Nampaklah berkelip cahaya cemerlang,
Itulah NII yang dibangun PUSA,
Bersinar cahayanya gilang gemilang.

NII sekolah menengah Islam,
Tempat menuntut putera dan puteri,
Sama-sama berbimbing tangan,
Untuk memajukan Islam suci.

⁹⁴ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 306.

Wahai kaumku Aceh mulia,
Bangunlah-bangun majukan bangsa,
Lihatlah kepada Ulama kita,
Mereka 'lah siap di barisan muka.

Itu NII telah sedia,
Tempat kita melatih diri,
Marilah mari bersama-sama,
Untuk mencapai derajat tinggi.

Puisi diatas jelas menggambarkan betapa diinginkannya NII oleh masyarakat Aceh untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Disamping itu, NII juga merupakan hasil karya dari para Ulama yang tergabung dalam PUSA yang merupakan sosok yang diteladani oleh masyarakat. Jika dilihat dari gaya hidup masyarakat Aceh yang identik dengan Islam, maka motivasi mereka dalam mengejar ilmu ini didasari oleh isi Al Qur'an dalam surat Az Zumar, ayat 9 yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, derajatnya lebih tinggi di mata Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Inilah faktor yang paling besar pada masyarakat Aceh untuk menuntut ilmu dengan salah satu caranya ialah memasuki NII.

III. 2. 2. Kongres Pertama PUSA

Kongres PUSA yang pertama ini diselenggarakan pada tanggal 20 – 24 April 1940 di Kuta Asan, Sigli.⁹⁵ Pemilihan tempat di Kuta Asan ini juga untuk mengenang sejarah kota pertahanan Islam zaman lampau, yang bangunannya dibuat oleh tangan orang Aceh sendiri. Perhatian masyarakat Aceh terhadap PUSA yang berusaha untuk memajukan Aceh, begitu besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ucapan “selamat

⁹⁵ Ismuha, *loc. cit.*, No. 15, 1969, hlm. 33.

berkongres” yang diutarakan oleh berbagai pihak, diantaranya adalah Asisten Residen Sigli, Residen Aceh, *Controleur* Sigli, *Controleur* Lammeulo, Uleebalang-uleebalang yang berhalangan hadir, Himpunan Pelajar Aceh di Bukittinggi, beberapa orang dari Singapura, Padang dan tempat-tempat lainnya.⁹⁶

Dalam program kerja kongresnya, PUSA menggunakan dasar Agama Islam untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya.⁹⁷ Cara pertama yang dilakukan adalah membasmi *khurafat-khurafat*, *bid'ah-bid'ah* dan *takhayul*⁹⁸, sedangkan cara kedua adalah PUSA akan memperbaiki kehidupan rakyat Aceh.⁹⁹ Cara yang kedua ini dapat diwujudkan dengan memasuki Normal Islam Institut yang didirikan oleh PUSA sebagai upaya untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi untuk digunakan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Aceh. Dengan demikian jelaslah bahwa PUSA akan berjuang di bidang sosial dan ekonomi dengan berdasarkan Islam.

Selain itu, Pengurus Besar PUSA juga mengemukakan lima pokok persoalan organisasi yang berkenaan dengan azas, usaha dan harapan yang ditujukan kepada berbagai golongan dalam masyarakat. Pokok pertama adalah bahwa PUSA mengambil Islam sebagai azas organisasi. Hal ini terinspirasi oleh perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang memimpin bangsa Arab dengan berpedoman kepada Al Quran. Kedua, rencana PUSA belum dapat dilaksanakan, selain mendirikan sekolah Normal Islam Institut di Bireuen. Ketiga, rakyat Aceh belum

⁹⁶ Verslag Ringkas Kongres PUSA ke-I, dalam *Sinar* 10 Mei 1940, hlm. 159.

⁹⁷ *Sinar*, 13 April 1940, hlm. 131.

⁹⁸ Khurafat adalah dongeng yang tidak masuk akal. Bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Takhayul adalah sesuatu yang hanya ada di khayal belaka.

⁹⁹ *Sinar*, *loc. cit.*, hlm. 131.

mempunyai suatu *Pers* dan *Drukkerij* sendiri. Keempat, memberikan pengertian kepada sidang bahwa Islam itu luas maknanya dan agar para pemuda sadar akan hal itu. Pokok yang kelima adalah bahwa dalam proses perjalanannya, PUSA akan dihadapkan pada enam golongan yang ada dalam masyarakat Aceh. Golongan-golongan tersebut adalah Pemerintah, Raja-raja, kaum terpelajar, Ulama-ulama, orang-orang Kaya, dan rakyat umum.¹⁰⁰

PUSA mengharapkan terjalinnya kerjasama yang baik dari masing-masing golongan masyarakat tersebut. Dari pihak pemerintah, PUSA mengharapkan perlindungan agar usaha-usahanya dapat berjalan lancar di tengah masyarakat. Dari Raja-raja diharapkan untuk dapat memberi keleluasaan kepada PUSA untuk menjalankan aktifitas di wilayah mereka. Raja-raja yang dimaksud disini adalah para Uleebalang yang mempunyai daerah kekuasaan tersendiri. Selanjutnya dari kaum terpelajar, diharapkan adanya teguran, apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PUSA. PUSA juga berharap kaum ini dapat melakukan penelitian tentang Islam yang mengandung pengetahuan yang sangat dalam. Dari Ulama diharapkan adanya pemeriksaan terhadap usaha-usaha PUSA terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kritik, dan sebaiknya seluruh Ulama masuk ke dalam PUSA karena tenaga mereka sangat dibutuhkan. Dari orang-orang kaya/hartawan, diharapkan bantuan dananya. Dan yang terakhir, dari rakyat umum, diharapkan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar serta menghindari perselisihan dalam perkara yang kecil.¹⁰¹

¹⁰⁰ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 308 – 309.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 309 – 310.

Kongres pertama PUSA ini selain dihadiri oleh utusan resmi dari pimpinan PUSA tingkat Kabupaten juga dihadiri oleh Ulama, Cendikiawan, Uleebalang dan juga para undangan dari luar daerah, antara lain: Mahmud Yunus (Direktur Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Padang), Rangkayo Rahmah El Yunusiyah (Direktur Diniyah Putri Padang Panjang), serta pelajar-pelajar dari berbagai madrasah di Aceh. Para pelajar tersebut turut memeriahkan kongres dengan mengikuti berbagai perlombaan seperti, pertandingan sepak bola, perlombaan pidato baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab.¹⁰² Adapun keputusan dari kongres PUSA yang pertama ini adalah:¹⁰³

1. Membentuk Pemuda PUSA sebagai tenaga baru dan calon pengganti Ulama yang sudah lanjut usia. Lalu sebagai ketuanya adalah Teungku Amir Husein Al-Mujahid.
2. Membentuk Majelis *Tanfiziyah Syari'ah* dan memilih Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri sebagai ketuanya.
3. Membentuk Muslimat PUSA agar perjuangan antara laki-laki dan perempuan seimbang yang diketuai oleh istri Teungku M. Daud Beureu'eh yaitu Teungku Nya' Asma Paleue
4. Menyepakati diadakannya suatu *leerplan*/rencana pelajaran untuk seluruh sekolah agama di Aceh.

¹⁰² Verslag Ringkas Kongres PUSA ke-I, *loc. cit.*, hlm. 160.

¹⁰³ Ismuha, *loc. cit.*, hlm. 33 – 34.

5. Membuat peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin serta memperkuat organisasi PUSA, Pemuda PUSA dan Muslimat PUSA.
6. Pengurus Besar PUSA harus bergerak langsung dengan seluruh cabang PUSA untuk memantapkan ide dan cita-cita PUSA dalam segala bidang.
7. Pengurus Besar PUSA harus mengikuti perkembangan perang dunia ke-II.
8. Membentuk bagian penyiaran dan menerbitkan majalah dibawah pimpinan Teungku Ismail Yakub.

III. 2. 3. Membentuk Pemuda PUSA, Kasysyafatul Islam, Putri PUSA dan Mengaktifkan Muslimat PUSA.

Kongres pertama PUSA dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat Aceh bagi peningkatan ilmu dan pengalaman berorganisasi. Banyak masukan dari Ulama yang hadir mengenai penyempurnaan organisasi PUSA dengan membentuk bagian pemuda, bagian *Tanfiziyah* dan *Syari'iyah* serta bagian muslimat. Akhirnya dengan menerima masukan berharga dari Ulama yang hadir, maka dipilihlah ketua untuk menjadi pemimpin Pengurus Besar Pemuda PUSA. Ada suatu peristiwa yang menarik dalam proses pemilihan ini dimana terdapat seorang pemuda yang berani mengajukan diri dengan mengacungkan tangan seraya berkata “saya sanggup”. Pemuda tersebut adalah Teungku Amir Husein Al Mujahid dari Idi.¹⁰⁴ Dengan demikian terpilihah dia menjadi Ketua Pengurus Besar Pemuda PUSA secara

¹⁰⁴ Ismuha, *loc. cit.*, hlm. 34.

aklamasi dan kedudukan kantor Pengurus Besar Pemuda PUSA pun ditempatkan di
Idi. Susunan Pengurus Besar Pemuda PUSA adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

Ketua : Amir Husein Al Mujahid
Wakil Ketua : Yakub Hasan Ali
Sekretaris I : Abu Bakar Adamy
Sekretaris II : Husein Hitam
Bendahari : M. Arsyad Ali

Komisaris :
1. Teungku Usman Aziz
2. Ahmad Ubit Simpang Ulim
3. Yusuf Simpang Ulim

Pergerakan PUSA setelah terbentuknya Pemuda PUSA menjadi lebih aktif dalam memperluas pengaruhnya sampai ke daerah-daerah terpencil karena para pemuda Aceh merasa mempunyai wadah sendiri dalam melakukan aktifitasnya. Pengurus Besar Pemuda PUSA turun ke daerah-daerah kecamatan seluruh Aceh untuk membentuk cabang-cabangnya. Peranan Pemuda PUSA sangat besar dalam usaha memperlancar jalannya program penyeragaman pendidikan. Sebagian besar pelajar Islam di Aceh pun masuk menjadi anggota Pemuda PUSA. Hal ini sesuai dengan pernyataan A.J. Piekaar berikut ini:

Untuk pertama kali dalam sejarah Aceh, organisasi PUSA merupakan sebuah organisasi yang kehidupan dan tujuan beragama orang Aceh menemukan bentuknya sendiri. Dengan berdirinya PUSA sebagai sebuah gerakan, maka para Ulama maupun para kelompok-kelompok muda yang militan memperoleh tempatnya. PUSA sebuah gerakan yang dalam waktu yang paling pendek, telah berhasil memperoleh pengikutnya dalam jumlah yang sangat besar di seluruh daerah Aceh.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 327.

¹⁰⁶ A.J. Piekaar, *Atjeh En De Oorlog Met Japan* (terj. Abu Bakar), Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977, hlm. 28.

Dua bulan setelah Bagian Pemuda PUSA terbentuk, *Kasysyafatul* Muslim (KAMUS) Peusangan,¹⁰⁷ yang berdiri di Matang Glumpangdua dan Kepanduan Taman Siswa Bireuen yang telah berdiri sejak tahun 1934 menggabungkan diri ke dalam PUSA dan selanjutnya diberi nama *Kasysyafatul* Islam (K.I).¹⁰⁸ K.I mempunyai kegiatan membantu para orang tua dalam mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak mereka agar kelak menjadi orang Islam yang bertaqwa, sehingga berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Susunan *Kasysyafatul* Islam selengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- Ketua : Teuku Muhammad
Sekretaris : M. Nur El Ibrahimy
Anggota :
1. Teungku Syekh Abdul Hamid
 2. Abdul Gani Umar
 3. H. Abdul Gani
- Kwartir Daerah : Hadi Rafiuddin
Kwartir distrik :
1. Marah Adam memimpin K.I daerah Bireuen.
 2. Ahmad Abdullah memimpin K.I daerah Seulimeum.
 3. Ayah Rahman memimpin K.I daerah Pidie.
 4. P.S. Mauny memimpin K.I daerah Garut.
 5. Ibrahim Insya memimpin K.I daerah Luengputu.
 6. Rahmat memimpin K.I daerah Simpang Ulim.
 7. Jamaluddin memimpin K.I daerah Lampaku.

Pada 1941, juga terbentuk Putri PUSA di Indrapuri, Aceh Besar, yang beranggotakan 150 orang.¹¹⁰ Hal ini jelaslah suatu kemajuan dan perubahan besar

¹⁰⁷ *Kasysyafatul* adalah badan kepramukaan atau kepanduan.

¹⁰⁸ Ismuha, *loc. cit.*, hlm. 34.

¹⁰⁹ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 326.

¹¹⁰ *Ibid.*

sikap kaum wanita di Aceh. Kelompok ini secara resmi merupakan pelopor kaum wanita dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, dengan suara bulat juga, dipilihlah Teungku Nya' Asma, istri dari Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, sebagai ketua Mulimat PUSA.¹¹¹ Muslimat PUSA mempunyai kegiatan untuk menyadarkan kaum wanita Aceh akan pentingnya arti kemajuan. Lalu dengan kesadaran yang dimiliki itu, wanita Aceh diharapkan mulai memasuki sekolah, bergerak seperti kaum laki-laki.¹¹² Perubahan ini diharapkan dapat merubah sikap wanita Aceh yang selama ini hanya berdiam diri di rumah, berubah menjadi menyibukkan diri dengan sekolah bagi anak-anak dan kegiatan organisasi bagi orang dewasa dan kaum ibu.

Sebelum Muslimat PUSA dibentuk, di Aceh sudah terlebih dulu terdapat Aisyiah, bagian dari Muhammadiyah, Barisan Putri Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia (PERAMIINDO), dan Langsa Ibu Sepakat (L.I.S). Tahap ini dipandang sebagai suatu perubahan yang penting bagi gerakan pembaruan di Aceh.¹¹³

Selain dari hal-hal diatas, PUSA pun menggabungkan diri dengan MIAI pada 1941. Sesuai dengan sifatnya sebagai organisasi sosial keagamaan, maka aspirasi PUSA dalam bidang politik disalurkan dengan cara memasuki MIAI (Majelis Islam 'Ala Indonesia). MIAI sendiri merupakan wadah dari berbagai organisasi Islam yang didirikan di Surabaya pada 1937, sebagai hasil dari keputusan rapat gabungan antara

¹¹¹ *Loc. cit.*, hlm. 34.

¹¹² Sebagian besar kaum wanita di Aceh pada saat itu masih mempunyai fikiran yang kolot dimana hanya kaum laki-laki saja yang bersekolah dan bekerja. Sedangkan kaum wanita hanya menghabiskan waktunya di rumah saja.

¹¹³ *Penjoeloh*, tahun II nomor 15, 1941, hlm. 233. PERAMIINDO, berpusat di Montasik, sebagai peralihan dari SPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh) yang berpusat di Seulimeum.

berbagai organisasi Islam Indonesia, yaitu: PSII, Muhammadiyah, Al Islam, P.O.I., Al Irsyad, Hidayatul Islam Banyuwangi, Khairiyah Surabaya, PERSIS dan P.A.I. PUSA tercatat sebagai anggota MIAI yang ke-11, dari total 27 organisasi Islam yang menggabungkan diri ke dalamnya di tahun 1941.¹¹⁴

III. 3. PUSA pada Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

Pada 1942, tentara Jepang memasuki Aceh. Mereka disambut dengan hangat oleh rakyat Aceh karena memberikan pernyataan akan menghilangkan penjajahan bangsa Barat bagi bangsa-bangsa di Asia Timur. Perasaan benci rakyat Aceh terhadap Belanda membuat PUSA memihak kepada Jepang, dengan harapan Jepang akan membantu mengusir Belanda. Lebih jelasnya ialah bahwa pada saat Jepang menyatakan perang terhadap sekutu (termasuk Belanda didalamnya) pada 8 Desember 1942, maka rakyat Aceh berharap bahwa Belanda bisa diusir dari Indonesia dengan bantuan Jepang. Oleh sebab itu, pada saat koloni kelima Jepang yang diberi nama Fujiwara Kikan sampai di Aceh, mereka disambut oleh Ulama yang tergabung dalam PUSA dengan cara yang sangat rahasia.¹¹⁵ Bahkan karena rahasia inilah maka Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap di Peusangan dan Haji Abubakar Ibrahim yang mempelopori penerimaan Fujiwara Kikan di Aceh Utara, tidak berani memberitahukan mengenai masuknya barisan F ini kepada para

¹¹⁴ *Penjoeloh*, tahun II nomor 7, 1941, hlm. 62.

¹¹⁵ *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, loc. cit.*, hlm. 144.

Uleebalang yang berpikiran searah dengan Ulama, termasuk Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, yang merupakan pelindung PUSA.¹¹⁶

Tentara Jepang yang dikirim ke Aceh adalah tentara ke-25, Divisi Garda ke-2 ditambah dengan 1 Brigade yang berasal dari Divisi ke-18.¹¹⁷ Kekuatan pasukan ini berjumlah 20.000 orang.¹¹⁸ Pasukan Jepang mendarat di berbagai tempat yaitu di Sabang, Ujung Batee (Aceh Besar), Pantai Ladong (Aceh Besar), Kuala Bugak, Peureulak (Aceh Timur) dan Tanjung Tiram (Sumatera Timur).¹¹⁹ Pada saat Jepang memasuki Kutaraja (Banda Aceh) pada 12 Maret 1942, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara sudah bebas dari Belanda dan tentaranya, bahkan kapal terbang sekutu dengan pilotnya yang ditempatkan di lapangan terbang Lho' Nga, sudah kabur terlebih dahulu.¹²⁰

Pada 1942, Jepang berada dalam situasi perang melawan sekutu dan masuknya ke Indonesia juga masih dalam kerangka pendudukan. Itulah sebabnya Indonesia, mau tidak mau, terbawa juga ke dalam peperangan. Setelah pasukan tentara Jepang masuk ke Indonesia, maka hubungan Indonesia dengan negara-negara lain mulai menjauh, kecuali dengan Jepang. Jadi di bidang ekonomi pun Indonesia terpaksa berdiri sendiri dengan pengertian bahwa dalam segala bidang harus tunduk kepada tentara Jepang, yang dengan sendirinya mengutamakan peperangannya dan

¹¹⁶ Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, *op. cit.*, hlm 58.

¹¹⁷ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 91.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Ismuha, *op. cit.*, hlm. 61. Mengenai bebasnya beberapa daerah di Aceh ini dari Belanda merupakan akibat dari perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Ulama terhadap penjajah Belanda. Lebih lengkapnya baca Ismuha, *op. cit.*, hlm. 60 – 61.

sudah pasti kepentingan negara Jepang sendiri.¹²¹ Adapun 4 cara yang dilakukan oleh tentara Jepang untuk memelihara dan memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Cara pertama adalah dengan membentuk penyalur aspirasi dan kegiatan rakyat yaitu melalui organisasi yang lebih memihak kepada Jepang. Contohnya adalah dengan mengganti MIAI dengan MASJUMI di bawah pimpinan H. Wahid Hasjim dan PUTERA yang diganti dengan *Hoo Kookai* dengan diketuai oleh Soekarno – Hatta. Kedua, tentara Jepang membuat propaganda mengenai maksud-maksud baiknya demi kepentingan perang. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menguasai alat-alat propaganda seperti surat kabar, kantor berita, radio, film dan lain-lainnya. Oleh karena itu dipropagandakanlah gerakan tentara Jepang yang terkenal dengan sebutan “Gerakan 3 A”.¹²² Lalu ada juga sebutan “saudara tua” bagi Jepang dan “saudara muda” bagi Indonesia yang ditujukan untuk melancarkan propaganda mereka. Ketiga, tentara Jepang mendekati kaum terpelajar di Aceh agar membantu mereka dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi dan sosial. Cara yang terakhir adalah mengadakan latihan militer bagi orang Indonesia, seperti *Heiho*, *Kempetai* dan *Seinendan*.¹²³

Adapun hasil nyata perjuangan PUSA pada masa pendudukan Jepang dalam bidang pemerintahan adalah mengatur kembali peradilan, dalam hal ini mencakup peradilan negeri maupun agama. Para pemimpin PUSA berpendapat bahwa inti dari

¹²¹ Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia Jilid I*. Jakarta: Grafica, 1963, hlm. 81.

¹²² Gerakan 3 A dikenal dengan semboyan “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Pemimpin Asia” dan “Jepang Cahaya Asia”.

¹²³ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 352 – 353.

penyebab keresahan dalam masyarakat adalah karena tidak adanya keadilan. Susunan peradilan pada masa Belanda yang dinamakan Meusapat terdiri dari *Controleur* sebagai Ketua dan beberapa Uleebalang sebagai anggota, pada masa pendudukan Jepang peradilan ini dirubah dengan susunan baru. Lembaga peradilan di masa Jepang mencakup tugas yang luas, bukan hanya sebagai pengatur pengadilan, tetapi juga mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang agama. Dengan ketetapan Aceh *Syu Tyokan* (residen) pada Desember 1943, seluruh kekuasaan peradilan *Gunco* dan *Sonco* ditiadakan dan diserahkan kepada hakim-hakim susunan baru, yaitu *Ku Hoin*, *Ciho Hoin* dan *Koto Hoin*.¹²⁴ Badan-badan ini bebas dari campur tangan instansi pemerintah yang lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Adapun Mahkamah Agama ditetapkan dengan Ketetapan Aceh *Syu Rei* tanggal 15 Februari 1944 nomor 12.¹²⁵ Tugas dari Mahkamah Agama (*Syukyo Hoin*) adalah bermufakat dan menetapkan segala urusan tentang pernikahan, mengubah dan memperbaiki hukum yang ditetapkan oleh *Kadli Son* menurut kekuasaan jabatan, dan terakhir mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan Agama Islam sesuai yang diperintahkan oleh Aceh *Syu Tyokan*.¹²⁶

Sebagai Ketua Mahkamah Agama ditetapkan Teungku H. Djakfar Siddik Lamjabat, seorang Ulama terkemuka di Banda Aceh. Sebagai anggota ditetapkan enam Ulama terkenal, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, Teungku H.

¹²⁴ Saya Shiraishi, "Pemerintahan Militer Jepang di Aceh, 1942 – 1945" dalam Akira Nagazumi (peny.), *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor, 1988, hlm. 59.

¹²⁵ Ismuha, *op. cit.*, hlm. 76.

¹²⁶ Ismuha, "Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti" dalam Ismail Suny (Ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, *op. cit.*, hlm. 237.

Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Abdul Wahab Seulimeum, Teungku H. Abdullah Ujong Rimba, Teungku Abdussalam dan Said Abubakar.¹²⁷

Penetapan peraturan tentang peradilan ini sedikit banyak mengandung unsur politik dari pihak Jepang untuk mendekati golongan Ulama dan untuk menghormati serta menghargai agama Islam yang patut dan sesuai di daerah Aceh. Memang sudah seharusnya apabila Jepang menghargai Ulama dan agama Islam karena Ulama yang tergabung dalam PUSA telah mempermudah kedatangan Jepang ke Aceh. Hal ini dapat juga dilihat dalam pernyataan Harry J. Benda berikut ini:

Di Aceh, kubu Islam yang secara tradisional sangat fanatik, apa yang disebut organisasi "F" memainkan peranan yang penting selama pendudukan dan mendapat imbalan yang baik selama pendudukan.¹²⁸

Keadaan Jepang yang sedang berperang melawan sekutu dalam perang Asia Timur Raya, yang melibatkan rakyat Indonesia untuk membantu dalam berbagai bidang tenaga dan perbekalan, mau tidak mau menyebabkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Semakin lama semakin terasa penderitaan tersebut dan tindakan tentara Jepang pun semakin keras terhadap rakyat Indonesia. Sikap Jepang yang diperlihatkannya saat permulaan datang ke Aceh, rupanya tidak berjalan lama. Saudara tua yang menjanjikan kemerdekaan dan kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia ternyata berubah janji. Kekasaran sikap tentara Jepang seperti mencaci-maki dan menampar sering dilakukan kepada orang yang melakukan kesalahan kecil

¹²⁷ Saya Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 60.

¹²⁸ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hlm. 136. Organisasi "F" adalah *Fujiwara Kikan* atau Barisan Fujiwara yang bertugas untuk melancarkan usaha Jepang untuk masuk ke Aceh pada 1942. Organisasi ini juga merupakan penggerak dalam melakukan pemberontakan melawan Belanda. Lebih lengkapnya lihat TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 300 – 301.

seperti tidak memberi hormat di pos-pos penjagaan tentara Jepang.¹²⁹ Dari segi adat dan agama juga Jepang bertentangan dengan Aceh. Agama Sinto yang dianut oleh orang Jepang memperbolehkan memakan babi, binatang yang diharamkan dagingnya untuk dimakan di dalam Islam, yang mayoritas dianut oleh orang Aceh. Belum lagi adanya pemaksaan untuk menghormati matahari terbit dengan cara rukuk/membungkuk (*seikeirei*) bagi rakyat Aceh. Berbagai adat kebiasaan dan kesewenangan orang-orang Jepang inilah yang membuat Ulama marah dan melakukan pemberontakan. Tercatat ada dua pemberontakan yang terjadi terhadap Jepang.¹³⁰ Pemberontakan pertama terjadi pada awal tahun 1942 di Bayu, di bawah pimpinan seorang Ulama yang bernama Teungku Abd. Jalil. Dia bersama dengan 200 orang muridnya mengalahkan satu kompi tentara Jepang.¹³¹ Namun pemberontakan ini diakhiri dengan kekalahan di pihak Teungku Abd. Jalil dan pengikutnya dikarenakan Jepang mengirim tentara bantuan yang lebih banyak dengan persenjataan yang lebih modern juga. Adapun pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan yang terjadi di daerah Pandrah, Kecamatan Jeunieb pada tanggal 2 Mei 1945.¹³² Pemberontakan ini mengakibatkan 104 orang tentara Jepang tewas, sedangkan dari pihak pemberontak terdapat 44 orang yang terbunuh.¹³³ Pemberontakan Pandrah yang banyak menimbulkan korban jiwa bagi Jepang ini membuat tentara Jepang marah sehingga mereka kemudian melakukan penangkapan secara sewenang-wenang

¹²⁹ M.D., Sagimun. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985, hlm. 70.

¹³⁰ *Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 13, loc. cit.*, hlm. 144.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm. 145.

¹³³ *Ibid.*

terhadap rakyat dalam Kecamatan Jeunib yang mereka anggap berkaitan dengan pemberontakan Pandrah.¹³⁴

Kegiatan PUSA pada masa pendudukan Jepang tidak lagi terpusat pada membenahan organisasi, akan tetapi sudah menjurus kepada gerak politik Jepang dan memperhatikan nasib rakyat Aceh. PUSA secara politis berusaha melepaskan rakyat dari kejahatan dan kesewenangan tentara Jepang, serta berusaha menghilangkan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada PUSA oleh orang-orang yang tidak senang terhadap PUSA. Dengan kata lain, PUSA pada pendudukan Jepang lebih mencurahkan kegiatannya ke dalam politik praktis dengan tujuan pembelaan terhadap rakyat tertindas. Seluruh waktu di masa pendudukan Jepang dipergunakan oleh Pengurus Besar PUSA untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Tidak pernah diadakan konferensi atau kongres selama masa pendudukan Jepang dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pemerintah militer Jepang untuk mengadakan rapat-rapat resmi dan pertemuan-pertemuan besar. Baru pada 1946, PUSA mengadakan konferensinya yang kedua di Banda Aceh.¹³⁵ Keputusannya adalah memindahkan kantor Pengurus Besar PUSA ke Banda Aceh dan memindahkan kantor Pengurus Besar Pemuda PUSA ke Sigli.¹³⁶ Di samping itu tujuan lainnya adalah pembaruan tekad untuk memperkuat organisasi dan memberi kesadaran kepada anggota akan perjuangan yang masih menempuh jalan panjang dan berliku-liku.

¹³⁴ A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, hlm. 144 – 145.

¹³⁵ Ismuha, *loc. cit.*, hlm 38.

¹³⁶ *Ibid.*

BAB IV

PUSA PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945 – 1949

Sekalipun Jepang berusaha keras untuk memenangkan perang melawan sekutu, namun hasil akhir adalah kekalahan total bagi Jepang. Dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima pada 8 Agustus 1945, memaksa Tenno Heika/Kaisar Jepang menyerah kalah tanpa syarat sebelum sempat memenuhi janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang resmi menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945.¹³⁷

Di Jakarta, setelah mengetahui berita menyerahnya Jepang tersebut, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 yang mengatasmakan bangsa Indonesia. Para wakil rakyat pun datang dari seluruh kepulauan Indonesia untuk ikut menyaksikan persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu.¹³⁸ Diantara para wakil rakyat yang datang adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, J. Latuharhary, Radjiman Widyodiningrat, Dr. Moh. Amir, Prof. Dr. Supomo, G.S.J.S. Ratulangi, I Gusti Ketut Pudja, Otto Iskandar Dinata, Samsi, Dr. Buntaran, Iwa Kusuma Sumantri, A.A. Hamidhan, A.A. Rifai, Andi

¹³⁷ A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 149.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

Sultan Daeng Radja, A. Abbas, Andi Pangeran dan para pemimpin revolusioner yang memelopori perjuangan proklamasi.¹³⁹

Rakyat Jakarta sendiri pada umumnya pun masih ragu-ragu menerima berita tentang proklamasi Indonesia, karena surat-surat kabar tidak mengumumkannya. Bahkan dua hari berikutnya, pers juga belum memuat berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Kebingungan rakyat akhirnya dapat dilenyapkan dengan adanya usaha para pemuda revolusioner yang mengadakan siaran ilegal. Sementara itu berita tentang menyerahnya Jepang sudah tersebar luas dari mulut ke mulut. Empat hari setelah proklamasi barulah surat-surat kabar di seluruh Jawa dan pemancar radio tentara Jepang mengumumkan hal tentang usainya Perang Asia Timur Raya, bersamaan dengan pengumuman teks pidato Tenno Heika tentang penyerahan Jepang terhadap Sekutu. Adapun mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak disiarkan dalam pers Jepang dikarenakan proklamasi tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan izin Jepang.¹⁴⁰

Di Aceh, berita mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu diumumkan kepada rakyat pada 24 Agustus 1945.¹⁴¹ Pada tanggal ini juga Teuku Nyak Arif, selaku Residen Aceh, mengumumkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia secara umum, sehingga dalam waktu singkat berita ini dapat diketahui

¹³⁹ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 364.

¹⁴⁰ Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia Jilid II*, Jakarta: Grafica, 1963, hlm. 17.

¹⁴¹ Ismuha, *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, *op. cit.*, hlm. 67. Hal ini dikarenakan baru pada 24 Agustus 1945 Atjeh Syu Tyokan mengumpulkan seluruh pegawai di tempat kediamannya untuk memberitahukan bahwa Tenno Heika/Raja Jepang telah berdamai dengan sekutu.

rakyat di seluruh Aceh.¹⁴² Seiring dengan kekalahan Jepang, keadaan di Aceh menjadi tidak menentu. Berbagai provokasi mulai timbul ditengah masyarakat. Diantaranya adalah tersiar kabar bahwa tentara Tiongkok akan mendarat di Aceh, berita lainnya adalah bahwa tentara Australia yang akan mendarat. Ditambah lagi dengan adanya selebaran-selebaran/pamflet yang disebarakan dengan pesawat terbang yang berasal dari Kerajaan Belanda, yang menyebutkan bahwa tentara Belanda akan datang kembali ke Indonesia untuk mengatur Indonesia seperti dahulu.¹⁴³ Berbagai isu yang tidak jelas sumbernya tersebut menyebabkan rakyat menjadi bingung mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi.

Setelah diketahui bahwa tentara Belanda yang akan datang ke Aceh, Ulama Aceh pun bereaksi dengan mengeluarkan fatwa yang berupa Maklumat Perang Sabil pada 15 Oktober 1945 untuk membela kemerdekaan yang telah diproklamirkan.¹⁴⁴ Dengan adanya Maklumat Ulama Aceh ini, maka resmilah diketahui oleh rakyat Aceh dasar dan landasan yang dihadapi segenap lapisan. Dasar dan landasan yang dimaksud ialah kewajiban untuk membela negara demi menegakkan kemerdekaan. Hukum membela negara itu adalah wajib dan mati dalam peperangan itu hukumnya syahid. Orang yang mati syahid dalam membela negaranya akan memperoleh surga. Sehubungan dengan hal ini, maka dibentuklah Laskar Mujahidin yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, Kesatria Pesindo dipimpin oleh A. Hasjmy dan Barisan Berani Mati yang dipimpin oleh Teungku Amir Husein Al Mujahid.

¹⁴² A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 151.

¹⁴³ *Op. cit.*, hlm. 68.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

Barisan pasukan ini berturut-turut kemudian menjadi Divisi Teungku Chik Ditiro, Divisi Rencong dan Divisi Teungku Chik Paya Bakong.¹⁴⁵ Para pemimpin tersebut merupakan Pengurus Besar PUSA dan Pemuda PUSA. Dengan dikeluarkannya fatwa Ulama dan disertai dengan berdirinya berbagai barisan, maka semangat revolusi dan semangat Perang Sabil semakin menyala sehingga rakyat Aceh pun rela berkorban apa saja yang diperlukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Selama pecahnya Revolusi kemerdekaan, pemimpin-pemimpin PUSA pada umumnya sibuk berpartisipasi dalam mengatur pertahanan negara dan mengatur pemerintahan. Sampai tahun 1950, Ketua Pengurus Besar PUSA, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh memusatkan perhatiannya kepada masalah kenegaraan. Beliau menerima jabatan sebagai Anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, kemudian sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, bahkan kemudian dia menjabat sebagai Gubernur Aceh yang pertama setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada 1949.¹⁴⁶

Jika pada zaman pendudukan Jepang, pimpinan PUSA menduduki jabatan-jabatan di bidang pengadilan dan bidang agama dalam birokrasi pemerintahan, maka di awal kemerdekaan posisi PUSA lebih jauh masuk ke dalam birokrasi pemerintahan inti. Hal ini disebabkan oleh sikap tegas para pemimpin PUSA untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sikap pemimpin PUSA dan Pemuda PUSA ditunjukkan dengan mendirikan perkumpulan pemuda dan laskar rakyat yang

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴⁶ *Ibid.*

berjuang secara aktif mengusir Jepang dan mempertahankan kemerdekaan.¹⁴⁷ Di samping pertempuran dengan tentara Jepang untuk merebut senjata, rakyat Aceh juga mengalami perang saudara dengan kaum Uleebalang yang menginginkan kembalinya Belanda ke Aceh setelah kekalahan Jepang.

Mengingat dominannya peranan PUSA dalam bidang pemerintahan di Aceh, maka berangsur-angsur diadakan reorganisasi dalam pemerintahan, baik di bidang sipil maupun militer. Sebagian besar jabatan penting, mulai dari Bupati sampai dengan Kepala Desa (Keuchik) diberikan kepada orang-orang PUSA dan pengikutnya. Demikian juga kepolisian, kejaksaan dan instansi-instansi lainnya.¹⁴⁸

Pada 1947, keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo dijadikan satu daerah militer dan untuk menduduki jabatan Gubernur Militer diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dengan pangkat Jenderal Mayor (Tituler).¹⁴⁹ Staf Gubernur Militer terdiri dari Soetikno Padmosoemarto (Mayor Tituler), Teungku Abdul Wahab Seulimeum (Letnan Kolonel Tituler), A. Hasjmy (Mayor Tituler), Nyak Neh Lhok Nga (Mayor Tituler), Hasan Ali (Mayor Tituler) dan S. Abu Bakar (Mayor Tituler).¹⁵⁰

¹⁴⁷ Pemerintah RI Daerah Aceh, *Revolusi Desember 1945 di Atjeh atau Pembasmian Penghianat Tanah Air*. Kutaradja: Pemerintah Daerah Atjeh, 1949, hlm. 13.

¹⁴⁸ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II*, Bandung: Disjarah AD dan Angkasa, 1977, hlm. 563. Dia menyebutkan bahwa jabatan-jabatan penting di bidang kepamongprajaan diberikan kepada orang-orang PUSA, baik di lapangan sipil maupun militer, kecuali jabatan yang memerlukan keahlian khusus diberikan kepada orang-orang luar daerah.

¹⁴⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah, Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945 – 1949*, *op. cit.*, hlm. 218.

¹⁵⁰ Ismuha, *op. cit.*, hlm. 71.

Kedudukan dan tugas Gubernur Militer menurut Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 16 Mei 1949 antara lain adalah menjalankan pemerintahan sipil menurut peraturan-peraturan negara dan instruksi-instruksi Pemerintah Pusat dan bertanggungjawab kepada Pemerintah.¹⁵¹ Selanjutnya adalah mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dengan memperhatikan pertimbangan Komandan Sub Teritorial yang bersangkutan dan pada umumnya atas pimpinan dan petunjuk Panglima Teritorial Sumatera.¹⁵²

Berdasarkan Peraturan Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah nomor 8/Des. WKPM tahun 1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh, maka sejak Januari 1950 terbentuklah Provinsi Aceh dengan Gubernurnya Teungku Muhammad Daud Beure'eh dan Sekretaris Daerah R. Mardjono Danubroto.¹⁵³ Pemerintahan sehari-hari Provinsi Aceh dijalankan oleh Badan Eksekutif yang diketuai oleh Gubernur. Mereka adalah T.M. Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Umum, Abdul Gani Usman, M. Nur El Ibrahimy, O.K. Salamuddin dan A.R. Hasyim.¹⁵⁴ Untuk melengkapi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, maka pada 23 Januari 1950, dipilihlah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kebanyakan dari mereka merupakan anggota PUSA, adapun anggota-anggota DPR tersebut adalah:¹⁵⁵

¹⁵¹ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 374 – 375.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 375.

¹⁵³ A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 397.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

1. Teungku M. Nur El Ibrahimy
2. Teungku Abdul Wahab Seulimeum
3. Abdul Gani (Ayah Gani)
4. A.R. Hasyim
5. A.R. Hajat
6. Ismail Usman
7. Hasan Ali
8. O.K. H. Salamuddin
9. Teungku Ismail Yakub
10. Usman Aziz
11. A. Ghafur Akhir
12. Ismail Thaib
13. Teungku Hasan Hanafiah
14. Teuku Muhammad Amin
15. Teungku Abdul Hamid
16. Zaini Bakri
17. Banta Cut
18. Teungku Zamzami Yahya
19. Ibrahim Abduh
20. H.A. Halim Hasan
21. Mahyuddin Yusuf
22. Mawardi Nur
23. Teungku H. Ali Balwi
24. Bachtiar Junus
25. N.D. Pane
26. Karim Yusuf
27. Leim Hong Moh.

Provinsi Aceh berjalan dengan baik dan lancar. Gubernur, Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Akan tetapi, tiga bulan setelah terbentuknya Provinsi Aceh, tersiar isu mengenai adanya anggota parlemen yang tidak menyetujui pembentukan Provinsi ini, sementara rakyat Aceh menginginkan Provinsi otonomi bagi Aceh.

Pimpinan PUSA dan Pemuda PUSA mulai mengeluarkan pengumuman yang menentang keras berbagai pihak yang tidak menyetujui pembentukan Provinsi Aceh. Suasana menjadi tegang antara kubu yang pro dan kontra terhadap pembentukan

Provinsi Aceh tersebut. Provinsi Aceh tidak berjalan lama karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada 14 Agustus 1950 yang mengharuskan Provinsi Aceh (yang telah kembali menjadi Keresidenan Administratif) untuk meleburkan diri ke dalam Provinsi Sumatera Utara.¹⁵⁶

IV. 1. Peran PUSA dalam bidang sosial dan politik

IV. 1. 1. Menumpas Pengkhianat dalam Perang Cumbok

Berita tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu pada Agustus 1945, menimbulkan perasaan yang saling bertentangan dalam masyarakat Aceh. Di satu pihak, Uleebalang mengharapkan Belanda kembali datang ke Indonesia agar mereka mendapatkan kekuasaan yang besar kembali. Di pihak lain, rakyat Aceh merasa takut dan tidak senang apabila Belanda kembali menjajah Indonesia karena hanya akan membawa penderitaan terhadap mereka.

Sejak Agustus 1945, sebagian Uleebalang yang dipimpin oleh T.M. Daud, yang merupakan seorang Uleebalang dari *Landschap* Cumbok sudah mulai membentuk panitia-panitia yang ditujukan untuk menyambut kedatangan Belanda.¹⁵⁷ Mereka bahkan telah mengadakan hubungan dengan pihak Belanda di Medan, yang diwakili oleh *Controleur* van Swier untuk mengatur siasat selanjutnya.¹⁵⁸

Pada 22 Oktober 1945, dengan bertempat di Bireuen di rumah Teuku Keumangan Umar, para Uleebalang mengadakan suatu konferensi yang dimaksudkan

¹⁵⁶ Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hlm. 75.

¹⁵⁷ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 566.

¹⁵⁸ *Ibid.*

agar kaum Uleebalang mempertahankan kekuasaannya.¹⁵⁹ Sebagai keputusan konferensi tersebut, kaum Uleebalang memutuskan akan mengadakan tentara sendiri yang bernama Badan Penjaga Keamanan (BPK) untuk menjadi kekuatan pendukung dari setiap gerakan mereka. BPK berpusat di Lammeulo yang dikepalai oleh T.M. Daud. Bersamaan dengan itu, kaum Uleebalang juga membentuk organisasi bernama Markas Uleebalang. Kegiatan militer dari BPK ini sendiri diserahkan oleh T.M. Daud kepada adiknya yang bernama Teuku Mahmud. Kemudian untuk memperkuat BPK, Teuku Mahmud mendatangkan orang-orang bekas anggota KNIL/serdadu Belanda, para tukang pukul dan bekas narapidana dari Medan sebagai tenaga inti pasukannya.¹⁶⁰ BPK dibagi menjadi tiga barisan, yaitu Barisan cap Bintang, Barisan cap Sauh dan yang terakhir adalah Barisan cap Cumbok.¹⁶¹ Adapun tugas dari barisan yang pertama yaitu Barisan cap Bintang adalah membunuh rakyat yang tidak mau tunduk pada kekuasaan BPK. Tugas Barisan cap Sauh adalah merampok harta rakyat, khususnya yang menjadi anggota barisan-barisan perjuangan kemerdekaan untuk membiayai BPK. Terakhir adalah Barisan cap Cumbok yang bertugas untuk menangkap dan membunuh para cendekiawan yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga menculik gadis-gadis untuk memuaskan nafsu para anggota BPK.

¹⁵⁹ Teuku Keumangan Umar merupakan seorang pemberontak yang terbesar terhadap kekuasaan kerajaan Aceh yang sah dan penandatanganan *korte-verklaring* (perjanjian pendek) dengan Belanda yang pertama.

¹⁶⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 146.

¹⁶¹ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 567.

BPK dipersenjatai dengan senjata yang diperoleh T.M. Daud dari gudang senjata Jepang di Lammeulo. Senjata-senjata ini jumlahnya banyak sekali sehingga kekuatan TKR ataupun lanskar rakyat yang ada di Kabupaten Pidie tidaklah seimbang dengan kekuatan BPK ini. Melihat tugas yang diberikan kepada tiap-tiap barisan ini maka jelaslah bahwa Uleebalang ingin memperoleh kekuasaan di Aceh dengan cara paksa dan kejam. Walaupun tidak semua Uleebalang berpartisipasi dalam Markas Uleebalang, tetapi persenjataan bagi BPK ini ditanggung bersama oleh sebagian besar Uleebalang sehingga mereka mempunyai persenjataan yang lengkap.¹⁶² Untuk menghindari terjadinya kontak senjata, pemerintah RI daerah Aceh memutuskan untuk tidak menempatkan TKR di tempat yang terdapat BPK. Setelah mendapatkan latihan yang cukup, Markas Uleebalang mulai melakukan tindakan terhadap badan-badan perjuangan kemerdekaan, terutama atas anggota-anggota PUSA. Mereka bahkan menurunkan dan melarang pengibaran bendera Merah Putih serta merobek-robek pamflet-pamflet yang berisikan tentang kemerdekaan Indonesia.¹⁶³

Pada 25 Oktober 1945 Markas Uleebalang juga mulai memerintahkan BPK untuk menangkap anggota-anggota PUSA yang bekerja sebagai pengawal nasional yang menjaga kantor-kantor pos, telfon serta bangunan-bangunan penting lainnya di kota Lammeulo.¹⁶⁴ Dengan maksud meruntuhkan semangat kemerdekaan para pemuda, Markas Uleebalang melakukan tindakan yang lebih keras. Pada 3 November

¹⁶² Diantara Uleebalang yang tidak termasuk ke dalam Markas Uleebalang adalah Uleebalang Bentara Pineueng, Idi dan umumnya di kabupaten-kabupaten lain di pantai timur Aceh.

¹⁶³ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 568.

¹⁶⁴ *Ibid.*

1945, beberapa orang pemimpin pemuda ditangkap lalu dipukuli selanjutnya lima hari kemudian Markas Uleebalang juga merampas kantor PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Lammeulo dan kantor tersebut dijadikan tempat perjudian untuk menghina pemuda-pemuda. Selain itu para tokoh dan anggota organisasi perjuangan tidak diizinkan untuk memasuki kota Lammeulo.

Setelah menguasai Lammeulo, pada Desember 1945 Markas Uleebalang mulai bergerak untuk menduduki dan menguasai kota Sigli, sebuah kota strategis yang jika berhasil dikuasai maka jalan perhubungan antara seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan di Aceh akan terputus.¹⁶⁵ Selain itu, Uleebalang juga sedang berusaha agar sisa tentara Jepang yang masih berada di Sigli mau menyerahkan senjatanya kepada mereka. Waspada akan terjadinya hal seperti demikian, rakyat yang dimobilisasi oleh pemuda mencoba mencegahnya dengan berbondong-bondong datang ke Sigli. Akan tetapi, mereka/rakyat umum tersebut tidak dapat memasuki Sigli karena BPK berjaga disana dan melarang mereka. Namun banyaknya rakyat yang datang membuat BPK ini terkepung dan merasa cemas. Akhirnya untuk membubarkan rakyat mereka secara semena-mena menembaki rakyat umum yang tidak bersenjata itu.¹⁶⁶ Pembunuhan massal ini terjadi mulai 4 – 6 Desember 1945 dan akhirnya dapat dihentikan oleh para pemimpin rakyat dan pemerintah RI daerah Aceh. Dalam penyelesaian ini digunakan cara damai dengan membuat suatu perjanjian antara para pemimpin organisasi pemuda beserta rakyat dengan Markas

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 569.

Uleebalang. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak itu berisi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Senjata-senjata yang telah diserahkan oleh Jepang kepada Markas Uleebalang haruslah diserahkan kepada pemerintah daerah Aceh dan dibawa oleh TKR ke Kutaraja.
2. Tentara Uleebalang ditarik kembali dari Sigli ke tempatnya semula.
3. Kota Sigli diserahkan kembali kepada pemerintah yang syah dan dijaga keamanannya oleh TKR, polisi dan alat-alat kekuasaan negara yang lain.
4. Fihak rakyat dan fihak Uleebalang meninggalkan kota Sigli dan kembali ke tempatnya masing-masing.

Namun ternyata perjanjian itu dilanggar oleh pihak Uleebalang sendiri. Pada kenyataannya mereka tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR bahkan mereka melakukan teror kepada banyak orang dalam perjalanan pulang ke tempat mereka, di Lammeulo, dengan menembaki siapa saja yang mereka curigai sebagai anggota golongan pemuda dan PUSA.¹⁶⁸ Jika dilihat dari kasus ini, jelaslah bahwa Uleebalang sangat tidak memandang hormat kepada pemerintah RI, mereka benar-benar tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia.

Pada 10 Desember 1945, Markas Uleebalang mengadakan rapat di Luengputu.¹⁶⁹ Rapat ini mengambil keputusan untuk menangkap dan membunuh para pemimpin pemuda dan pemimpin organisasi perjuangan lainnya. Mereka benar-benar patuh dalam menjalankan keputusan rapat mereka. Hal ini dapat dilihat dengan langsung bertindak mereka pada malam hari setelah rapat tersebut dilaksanakan. Sasarannya tentu saja rumah para pemimpin organisasi pejuang kemerdekaan. Hasilnya adalah banyaknya pemimpin gerakan perjuangan yang ditangkap dan

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 569 – 570.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 570.

¹⁶⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 160.

dibunuh. Pada 20 Desember 1945, mereka melanjutkan aksinya dengan membakar bangunan-bangunan umum seperti sekolah agama di Titeue dan kantor-kantor kehakiman.¹⁷⁰ Keganasan dan kekejaman Markas Uleebalang sungguh sudah sampai pada puncaknya. Bahkan polisi dan tentara republik yang merupakan aparaturnegara RI daerah Aceh tidak sanggup mengambil tindakan apapun karena masih lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Markas Uleebalang. Pada akhirnya rakyat sipil yang menjadi korban kekejaman Markas Uleebalang ini.

Akhirnya pemuda dan rakyat mengambil tindakan bersama untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kesabaran mereka benar-benar sudah lewat pada batasnya. Dengan dukungan PUSA, segenap organisasi perjuangan kemerdekaan mengambil keputusan untuk melawan pengkhianat bangsa dan tanah air ini dengan segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, Pada 22 Desember 1945 dibentuklah Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan berkedudukan di Garot, sebuah kampung yang tidak jauh letaknya dari Cumbok.¹⁷¹ Bersamaan dengan pembentukan MBRU ini, Ulama juga merumuskan tujuan perjuangan mereka, yaitu menghancurkan segala macam kejahatan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan tanah air.¹⁷²

Pada 8 Januari 1946, Pimpinan Divisi V/TKR Komandemen Sumatera di Kutaraja bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan ultimatum

¹⁷⁰ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 571.

¹⁷¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 160.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 160 – 161.

yang ditujukan kepada Markas Uleebalang.¹⁷³ Inti dari ultimatum ini adalah agar para anggota Markas Uleebalang menyerahkan diri sampai dengan batas waktu yang ditentukan.¹⁷⁴ Akan tetapi Markas Uleebalang rupanya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Setelah batas waktu yang diberikan telah usai, maka pada 10 Januari 1946 massa yang dikoordinir oleh para pemuda mulai bergerak untuk menghentikan kekejaman BPK yang telah menelan banyak korban.¹⁷⁵ Perang pun tidak dapat dihindarkan lagi antara pihak-pihak yang berseteru tersebut.

Akhirnya, pada 13 Januari 1946, Markas Uleebalang di kota Lammeulo dapat dikalahkan dan pasukan BPK pun mengalami hal yang sama. Akan tetapi, pemimpin Markas Uleebalang yaitu T.M. Daud Cumbok bersama beberapa pengikutnya melarikan diri ke arah pegunungan Seulawah, berusaha menyusuri pantai untuk meloloskan diri ke pulau Sabang.¹⁷⁶ Setelah tiga hari para pemuda melakukan pencarian di daerah pegunungan Seulawah, akhirnya Rabu 16 Januari 1946, T.M. Daud Cumbok dan pengikutnya berhasil ditangkap.¹⁷⁷ Dengan ditangkapnya T.M. Daud Cumbok, maka berakhirilah peristiwa Perang Cumbok dengan kemenangan di pihak golongan pro-republik.

¹⁷³ TGK. A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*. Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001/PT. Pelita Persatuan, 1992, hlm. 25.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

IV. 1. 2. Kongres ke-II PUSA

Walaupun dalam anggaran dasar PUSA disebutkan bahwa konferensi diadakan setahun sekali dan untuk kongres adalah tiga tahun sekali namun, situasi dan kondisi yang dihadapi tidak berjalan dengan lancar.¹⁷⁸ Diawali dengan masuknya tentara Jepang dan kemudian berlanjut dengan situasi dan kondisi yang lain sebagai akibat dari menyerahnya Jepang terhadap sekutu yang diiringi dengan semangat revolusi 1945, maka barulah pada bulan oktober 1946 konferensi PUSA yang kedua dapat diselenggarakan di Banda Aceh.¹⁷⁹ Tidak banyak keputusan-keputusan penting yang diperoleh dalam konferensi ini, karena pada dasarnya konferensi ini diadakan untuk memperbaharui kepengurusan PUSA dan untuk menyesuaikan keadaan. Keputusan-keputusan yang diperoleh diantaranya adalah:¹⁸⁰

1. Teungku Aiyub Samy menggantikan Teungku Amir Husein Al Mujahid sebagai ketua Pemuda PUSA. Hal ini dikarenakan Teungku Amir Husein Al Mujahid telah mendapat tugas baru untuk memimpin Biro Perjuangan dengan pangkat Jenderal Mayor.
2. A.R. Hasyim menggantikan kedudukan Teungku Ismail Yakub, yang sibuk memimpin majalah "Penjoeloeh", sebagai Sekretaris I. Selain itu juga menetapkan Ismuha sebagai Sekretaris II, sementara jabatan Sekretaris Umum tetap dipegang oleh T.M. Amin.

¹⁷⁸ *Penjoeloeh*, tahun II nomor 5 – 6 (Maret – April), 1941, hlm. 59.

¹⁷⁹ *Sinar Darussalam*, *loc. cit.*, hlm. 38.

¹⁸⁰ *Ibid.*

3. Kedudukan Pengurus Besar PUSA dipindahkan ke Banda Aceh karena sebagian besar anggota Pengurus Besar PUSA telah bertempat tinggal di Banda Aceh.
4. Menetapkan kota Lhokseumawe (ibukota Kabupaten Aceh Utara) sebagai tempat penyelenggaraan kongres PUSA kedua, yang menurut rencana akan diadakan di tahun 1947.

Agresi Militer Belanda yang pertama pada 1947 dan disusul dengan agresi yang kedua pada 1948, memaksa rakyat Aceh untuk memusatkan perhatian penuh kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka selama perjuangan itu konferensi dan kongres PUSA tidak mungkin dilaksanakan. Para pemimpin PUSA aktif dalam menyusun perlawanan terhadap Belanda dan mengatur perbekalan laskar-laskar.¹⁸¹ Ketua Pengurus Besar PUSA, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, bahkan diangkat oleh Pemerintah Pusat menjadi Gubernur Militer Aceh dan bertanggung jawab memimpin pemerintahan dalam suasana perang kemerdekaan melawan Belanda.¹⁸² Pada 27 Desember 1949, perang berakhir dengan kemenangan Indonesia dan diikuti dengan pengakuan serta penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia.¹⁸³

Barulah sesudah berakhirnya perjuangan fisik dengan Belanda, kongres PUSA yang kedua dipikirkan kembali. Kongres PUSA kedua ini diselenggarakan

¹⁸¹ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 379.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

pada tanggal 22 – 26 Desember 1950 di Kutaraja (Banda Aceh). Kongres PUSA yang kedua ini antara lain membicarakan tentang:¹⁸⁴

1. Pembaharuan organisasi sesuai dengan zaman baru.
2. Memperjuangkan otonomi daerah Aceh.
3. Pendidikan di sekolah-sekolah dan dayah-dayah.
4. Penyantunan yatim piatu dan fakir miskin.
5. Penyiaran dan pengembangan Agama Islam.
6. Pembangunan dalam bidang Ekonomi, industri dan pertanian.
7. Memilih pengurus baru.

Kongres memilih Teungku Abd. Wahab Seulimeum menjadi ketua Umum Pengurus Besar PUSA menggantikan Teungku M. Daud Beureu'eh, sedangkan Sekretaris Umum tetap dijabat oleh T.M. Amin. Ketua Umum Pemuda PUSA kembali dijabat oleh Teungku Amir Husein Al Mujahid,¹⁸⁵ menggantikan Teungku Aiyub Samy dan sebagai Sekretaris Umum Pemuda PUSA dipilih Abdullah Arif.¹⁸⁶

IV. 1. 3. Mengatasi Gerakan Sayid Ali

Dengan berakhirnya perang Cumbok, berarti kekuasaan politik sepenuhnya jatuh ke tangan PUSA dikarenakan peran besar mereka dalam membasmi Uleebalang Cumbok yang anti kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan dapat dikatakan seluruhnya berada di tangan mereka sehingga kesempatan bagi golongan Uleebalang

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Teungku Amir Husein Al Mujahid merupakan Ketua Umum Pemuda PUSA yang pertama.

¹⁸⁶ *Sinar Darussalam, loc. cit.*, hlm. 38.

mengadakan pembalasan telah tertutup. Pada akhir 1948, muncul suatu gerakan perlawanan terhadap pemerintahan PUSA yang dikenal dengan gerakan Sayid Ali.¹⁸⁷ Gerakan yang terjadi di Kutaraja ini dipimpin oleh beberapa orang, yaitu: Sayid Ali Alsaqaf, Haji Mukhsin, Nyak Sabi, Muhammad Meuraksa, Teungku Muhammad Asyik, Waki Harun.¹⁸⁸ Kelompok ini merupakan kombinasi dari Ulama tradisional dan sisa-sisa kaum Uleebalang. Para pemimpin gerakan Sayid Ali menuduh bahwa kalangan pemerintah di Aceh yang didominasi oleh PUSA telah bersikap provinsialistis dan memonopoli setiap jabatan. Tuduhan mereka adalah sebagai berikut:¹⁸⁹

1. Bahwa mereka, yang menduduki kursi-kursi pemerintahan, telah membentuk suatu perkumpulan yang bernama "Banteng Hitam".¹⁹⁰
2. Perkumpulan ini bersifat eksklusif dan memonopoli setiap jabatan pemerintahan di Aceh.
3. Bahwa mereka melakukan berbagai-bagai kecurangan dan kejahatan, antara lain:
 - a. Korupsi secara besar-besaran.
 - b. Melakukan perniagaan ilegal secara besar-besaran.
 - c. Melakukan pembunuhan atas mereka yang tidak disukai dan dianggap berbahaya bagi mereka.

¹⁸⁷ S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta: Soeroengan, 1957, hlm. 15.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 227.

¹⁹⁰ Lebih lengkapnya mengenai perkumpulan Banteng Hitam ini dapat dilihat di buku Nazaruddin Sjamsuddin, *ibid.*, hlm. 232.

- d. Tidak mengurus perbendaharaan pemerintah dan zakat dengan adil.
- e. Tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari Pemerintah Pusat.
- f. Mempergunakan hasil-hasil tambang minyak dan perkebunan untuk kepentingan diri sendiri.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Gubernur Sumatera, T.M. Hasan, agar dengan segera menangkap dan memecat orang-orang PUSA yang duduk dalam pemerintahan karena dianggap melakukan kecurangan-kecurangan. Ironisnya, beberapa Ulama PUSA pun ikut melibatkan diri dalam kelompok ini, walaupun pemerintahan di Aceh ini didukung oleh PUSA sendiri.¹⁹¹ Bersama pengikutnya, Sayid Ali mengancam akan mengambil tindakan sendiri jika tuntutananya tidak dipenuhi. Namun T.M. Hasan tidak mengacuhkan tuntutananya itu. Gagal mempengaruhi Gubernur Sumatera, Sayid Ali dan Teungku Muhammad Asyik mengadakan pertemuan dengan S.M. Amin yang merupakan Gubernur Sumatra Utara. Kepada Gubernur mereka mengungkapkan rencana gerakan mereka. Gubernur Amin dengan tegas menolak rencana mereka dan mengatakan bahwa rasionalisasi pemerintahan harus dilakukan sesuai peraturan bukan dengan cara yang liar.¹⁹²

¹⁹¹ Teungku Muhammad Asyik merupakan mantan Bendahara PUSA cabang Kutaraja. Adapun mengenai partisipasinya dalam gerakan Sayid Ali adalah dikarenakan terkena hasutan dari golongan komunis yang nyata merupakan musuh Ulama. Adalah Sarwono, seorang komunis yang berusaha agar Pesindo Aceh yang selama ini merupakan "Pesindo Islam" agar menjadi "Pesindo Komunis". Lihat A. Hasjmy, *Semangat Merdeka, op. cit.*, hlm. 328 – 330. Ada juga yang menyatakan bahwa sebagian Ulama PUSA termasuk Teungku Muhammad Asyik kecewa karena tidak mendapat kedudukan dan pembagian yang adil atas benda rampasan dari harta-harta Uleebalang sebagai hasil dari revolusi sosial di Aceh. Lihat A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid II, op. cit.*, hlm. 564.

¹⁹² A. Hasjmy, *op. cit.*, hlm. 330.

Reaksi S.M. Amin ditegaskan dengan dikeluarkannya Maklumat Gubernur Sumatera Utara yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹³

Pemerintah tidak akan segan bila perlu mempergunakan alat kekuasaannya untuk mengatasi sesuatu kegentingan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan seseorang, sekalipun tindakan itu dilakukannya dengan maksud yang suci.

Kutaraja, 20 Agustus 1948
Gubernur Sumatera Utara
dto
Mr. S.M. Amin

Bukannya takut akan Maklumat Gubernur Sumatera Utara Utara tersebut, Sayid Ali dan kawan-kawannya justru bergerak secara terbuka. Mereka mengkritik beberapa pejabat dalam rezim pemerintahan PUSA secara terang-terangan dengan menyebarkan pamflet tentang aib pejabat tersebut. Dalam pamflet tersebut, mereka menamakan dirinya sebagai alat revolusi.¹⁹⁴ Mereka menyerukan tentang perlunya suatu revolusi dengan alasan bahwa pejabat-pejabat pemerintahan telah menjadi korup. Demi menjaga kestabilan keamanan, maka pada 3 November 1948 para pengikut Gerakan Sayid Ali seperti Teungku Muhammad Asyik, Waki Harun, Haji Mukhsin, Muhammad Meuraksa dan Nyak Sabi ditangkap atas instruksi Teungku Muhammad Daud Beureu'eh.¹⁹⁵ Penangkapan ini merupakan akhir dari gerakan Sayid Ali.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 330 – 331.

¹⁹⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 231.

¹⁹⁵ *Op. cit.*, hlm. 332.

IV. 2. Melakukan Pembaruan dalam Bidang Agama

PUSA tidak mendiamkan sesuatu pelaksanaan agama yang tidak sesuai dengan Al Quran dan Hadits, baik mengenai akidah maupun syariah dan akhlak. Ulama PUSA juga sangat gigih memberantas bermacam bid'ah dalam ibadah,¹⁹⁶ antara lain Kenduri Kematian, baik kenduri pada hari kematian itu, kenduri jeurat, seunjuh dan sebagainya. Selain itu ada juga kenduri Maulid yang banyak mengeluarkan biaya tanpa menitikberatkan peringatan itu kepada keteladanan Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah kenduri pada kuburan-kuburan yang ditujukan untuk melepaskan nazar atau tolak bala.

Dalam rangka pemberantasan segala macam bid'ah dalam masyarakat Aceh, PUSA bersama pengurus-pengurus agama, Kepala Mahkamah Syariah Keresidenan Aceh dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam Kabupaten Aceh Besar yang diketuai dan disetujui oleh Wakil Kepala Pejabat Agama Keresidenan Aceh mengeluarkan Maklumat Bersama pada 5 Mei 1948.¹⁹⁷

Pemberantasan Praktek Salik buta

Di antara ajaran sesat yang diberantas oleh PUSA ialah salik buta, suatu ajaran peninggalan Teungku Teurbue Id Teupinraya Kabupaten Pidie. Ajaran salik buta mengatakan bahwa Allah, Muhammad dan Adam, pada hakikatnya adalah satu. Ajaran ini dilakukan oleh sejumlah penganut agama Islam di Aceh dengan cara

¹⁹⁶ Bid'ah adalah suatu perkara yang baru atau diada-adakan tanpa berdasarkan dalil. Aqidah adalah ajaran tentang keimanan terhadap keesaan Allah SWT. Akhlak adalah tabiat, perangai atau biasa disebut akhlakul karimah yaitu pola perilaku yang dilandaskan pada nilai-nilai iman, Islam dan ihsan. Syariah merupakan tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

¹⁹⁷ Drs. M. Daud Remantan, *op. cit.*, hlm. 392 – 393.

mengucapkan kalimat tauhid *Lailahaillallahu* secara nyaring dengan pendirian tidak perlu melaksanakan shalat lima waktu. Praktik ajaran ini biasanya dilakukan di malam hari dalam suatu rumah/bangunan dengan mengumpulkan dua kumpulan kelompok, satu kelompok lelaki dan kelompok lainnya adalah perempuan. Apabila malam telah larut kedua kelompok tersebut menyatu dalam kegelapan. Ada juga yang melakukan ajaran ini dengan satu kelompok saja dan tidak bercampur dengan lawan jenis. Kemudian karena dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut kata “hu” dari *Lailahaillallahu* terdengar lebih nyaring, sehingga kedengaran seperti bunyi kata “huk”, maka ajaran Salik Buta ini disebut juga dengan *Sulok Huk*.¹⁹⁸

Meskipun jelas bahwa ajaran tersebut menyimpang dari ketauhidan yang benar, namun menyebar juga ke daerah-daerah Kabupaten lainnya di Aceh, seperti ke Aceh Utara.¹⁹⁹ Sebelum timbul gerakan pembaruan di Aceh, praktek ajaran ini berjalan dengan aman. Akan tetapi begitu pemikiran pembaruan di Aceh yang dipelopori oleh PUSA sudah mulai bergerak, maka bangkitlah Ulama untuk mendakwahkan ajaran tauhid yang murni dan berusaha melenyapkan ajaran salik buta ini.²⁰⁰ PUSA mengambil tindakan tegas dalam usaha pemberantasan Salik Buta ini dengan menghancurkan gedung huk, sebutan untuk tempat pelaksanaannya. Setelah peristiwa penghancuran gedung huk tersebut, praktek Salik Buta tidak pernah terdengar lagi di Aceh.

¹⁹⁸ Tim Penulis IAIN Ar Raniry, *Ensikloperdi Pemikiran Ulama Aceh*. Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2004, hlm. 176 – 177.

¹⁹⁹ Tgk. Ismail Yakub, “Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh-Belanda Sampai Sekarang”. Dalam Ismail Suny (Editor), *Bunga Rampai Tentang Aceh, op. cit.*, hlm. 342.

²⁰⁰ Tauhid merupakan ajaran dalam agama Islam mengenai keesaan Allah.